EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BELANJA KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI

TUGAS AKHIR

TP216012001

Disusun Oleh:

Alika Fathinnah

31201900059

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BELANJA KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI

Tugas Akhir diajukan kepada :
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung

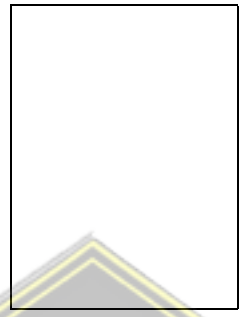

Oleh :
Alika Fathinnah
31201900059

Tugas Akhir ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada tanggal 31 Agustus 2023

DEWAN PENGUJI

Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT — Pembimbing I
NIK. 210298025

Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT — Pembimbing II
NIK. 220203034

Dr. Hj. Mila Karmilah, ST., MT — Penguji
NIK. 210298024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik Unissula

Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Hj. Mila Karmilah, ST., MT
NIK. 210298024

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alika Fathinnah
NIM : 31201900059
Status : Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi saya dengan judul **"Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi"** adalah karya ilmiah yang bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam Tugas Akhir/Skripsi ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Alika Fathinnah
31201900059

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT	Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT
NIK.210298025	NIK.220203034

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Alika Fathinnah
NIM	: 31201900059
Program Studi	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas	: Teknik

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul :

"EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BELANJA KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademia selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan dan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2023

Yang Menyatakan,

Alika Fathinnah

HALAMAN PERSEMBAHAN

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ۚ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ

"Dan Aku telah tanamkan dari kemurahan-Ku perasaan kasih sayang orang terhadapmu, dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan pengawasan-Ku." (QS. Toha : 9)

"Seberapa pun dewasa mengujimu, Takkan lebih dari yang engkau bisa"

Alhamdulilah atas pertolongan dan kekuatan yang allah berikan menjadikan tugas akhir saya selesai pada waktu terbaik. Saya persembahkan tugas akhir saya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Papa Eri Pebrianto dan Bunda Yenni Angraini yang tak pernah lekang mendoakan dan menyemangati apapun yang akan terjadi. Berkat doa mereka saya bisa sampai dititik ini. Semoga allah selalu menjaga mereka.
2. Saudara saya uni, dava, kak fani dan tasya yang menemani setiap suka duka dan keluhan saya. semoga kita tetap *sweet* sampai tua nanti.
3. Ibu Dr. Jamilla Kausary, ST., MT dan ibu Ir. Hj. Eppy Yuliani, MT sebagai pembimbing dan pengarah. Terimakasih banyak atas berbagai hal yang telah dilakukan. Dengan bimbingan dan arahan ibu, saya bisa berada disini dan semoga allah membalas kebaikan ibu semua.
4. Terimakasih untuk seluruh dosen dan staff admin planologi. Semoga ilmu yang saya dapatkan dan terapkan dikehidupan dapat terus memberikan amal jariyah bagi bapak ibu semua.
5. Teman-teman *Sad Girl* yang menemani perjalanan saya dari awal menjadi mahasiswa baru sampai saat ini. Terimakasih sudah mau direpotkan dan menyemangati saat sedih dan sakit saya. Semoga jalan kalian dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT. *See you on the top.*
6. *My partner* terlepas bagaimanapun akhirnya nanti. Terimakasih sudah percaya bahwa saya bisa melewati apapun arus yang datang.
7. Teman-teman Planologi 2019 serta semua kakak dan adik tingkat saya. Siapapun kalian terimakasih sudah mendoakan dan menyemangati saya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Yang atas berkah rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "**Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi**". Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, antara lain:

1. Bapak Ir H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung
2. Ibu Dr. Hj. Mila Karmilah, ST., MT., selaku Kaprodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Tugas Akhir
3. Ibu Dr. Jamilla Kautsary, ST., MT., dan Ibu Ir. Hj. Eppy Yuliani., MT selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi terselesaikannya tugas akhir ini
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Unissula yang telah memberikan ilmu selama peneliti menempuh perkuliahan
5. Seluruh staff Badan Administrasi Pengajaran Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan administrasi dan mendukung penelitian ini
6. Kedua orang tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dukungan
7. Semua narasumber yang telah memberikan akses data dan informasi
8. Teman teman Planologi Angkatan 2019 atas support dan doanya

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran positif sangat diperlukan dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, Agustus 2023

Peneliti

Abstrak

Dalam dokumen kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2019 – 2025 pemerintah melalui dinas Pariwisata melakukan Pembangunan Kembali pasar tersebut untuk optimalisasi pasar tradisional sebagai salah satu daya Tarik wisata belanja tradisional (Slow Shopping Tourism) dengan pengelompokkan dagangan yang tertata. dan didukung dengan infrastruktur yang mencukupi. Tetapi pada kenyataannya setelah implementasi program tersebut kondisi pasar atas masih belum sesuai yang diharapkan seperti masih banyak pedagang lama berjualan diluar pasar, pengembangan infrastruktur juga tidak sesuai dengan rencana (tidak adanya rest area, pusat informasi dan jasa penitipan), pengunjung pasar masih dari masyarakat dan wisatawan lokal bukan mancanegara, atau dapat dikatakan output tidak seperti yang diharapkan. Rumusan masalah penelitian ini ialah adanya gap antara tujuan penataan (output kebijakan yang diharapkan dalam dokumen rencana) dengan kondisi eksisting pasar setelah ditata, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan Kawasan pasar atas sebagai wisata belanja. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Sasaran penelitian ialah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif rasionalistik dengan triangulasi data. kesimpulan dari penelitian ini hasil evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi tidak terlaksana karena faktor masih banyak masalah yang sulit ditangani, ketidakmampuan kebijakan dalam menyusun proses implementasi, masih banyak variabel yang mempengaruhi proses implementasi diluar kebijaksanaan sehingga belum terpenuhinya tahap-tahap dalam proses impementasi.

Kata kunci : Evaluasi, Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Wisata Belanja

Abstract

In the policy document for the 2019 - 2025 Bukittinggi City Tourism Development Master Plan, the government through the Tourism Department is carrying out the reconstruction of the market to optimize traditional markets as one of the traditional shopping tourism attractions (Slow Shopping Tourism) with an organized grouping of merchandise. and supported by adequate infrastructure. But in reality, after the implementation of the program, the condition of the Pasar Atas is still not as expected, such as there are still many old traders selling outside the market, infrastructure development is also not in accordance with the plan (there is no rest area, information center and day care services), market visitors are still from the community and local tourists not foreign, or it can be said that the output is not as expected. The formulation of the research problem is that there is a gap between the objectives of the arrangement (the expected policy output in the plan document) and the existing conditions of the market after it has been arranged, thus raising the research question of how to implement the development policy for the Pasar Atas area as a shopping tourism. The purpose of this study is to evaluate the implementation process of Shopping Tourism Development Policy in the Pasar Atas Area of Bukittinggi City. The research target is to find factors that influence the success or failure of implementing shopping tourism development policies in the Pasar Atas Area of Bukittinggi City. This study uses a rationalistic qualitative method with data triangulation. The conclusion of this research is that the results of the evaluation of the implementation of the shopping tourism development policy in the Pasar Atas Area of Bukittinggi City were not implemented due to the factors that there are still many problems that are difficult to handle, the inability of the policy to develop the implementation process, there are still many variables that influence the implementation process outside of policy so that the stages have not been fulfilled. in the implementation process.

Keywords: Evaluation, Policy Implementation, Development, Shopping Tourism

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH iv
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I 1
1. 1 Latar Belakang 1
1. 2 Rumusan Masalah 2
1. 3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 2
1.3. 1 Tujuan Penelitian 2
1.3. 2 Sasaran Penelitian 2
1. 4 Fokus Penelitian 3
1.4.1 Lokasi Studi Penelitian 3
1. 5 Keaslian Penelitian 5
1. 6 Kerangka Penelitian 9
1. 7 Metode Penelitian 11
1.7.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 11
1.7.2 Tahap Penelitian 11
1.8 Sistematika Penelitian 17
BAB II 19
2.1 Pengertian Evaluasi 19
2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan 19
2.3 Parameter dan Variabel Evaluasi Implementasi Kebijakan 20
2.4 Pengertian Pengembangan Wisata 21
2.5 Tujuan Pengembangan Wisata 23

2.6 Pengertian Wisata Belanja 23
2.8 Konsepsi Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja 24
BAB III 26
3.1 Gambaran Kawasan Pasar Atas 26
3.2 Kondisi Fisik 31
3.3 Sejarah Kawasan Pasar Atas 33
3.4 Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi Sebagai Wisata Belanja Dalam Dokumen Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bukittinggi Tahun 2019 – 2025 35
BAB IV 37
4.1 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan 38
4.1.1 Kesulitan Teknis 38
4.1.2 Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran.....41
4.1.3 Presentase Kelompok Sasaran Dibanding Jumlah Keseluruhan.....43
4.1.4 Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang diinginkan.....44
4.1.5 Temuan Studi Parameter Mudah Atau Tidaknya Masalah Dikendalikan 49
4.2 Kemampuan Kebijakan Dalam Menstrukturkan Proses Implementasi 49
4.2.1 Kejelasan Konsistensi Tujuan.....50
4.2.2 Digunakannya Teori Kausal/Penyebab Yang Cukup 51
4.2.3 Ketepatan Alokasi Sumber Dana 52
4.2.4 Keserasian Hierarki Dalam Dan Diantara Lembaga Pelaksana.....54
4.2.5 Aturan Aturan Keputusan Dari Dinas Pelaksana.....56
4.2.6 Rekrutmen Pejabat Pelaksana 57
4.2.7 Akses Formal Pihak-Pihak Luar 58
4.2.6 Temuan studi kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi 59
4.3 Proses Implementasi dipengaruhi oleh variable-variable diluar kebijaksanaan 60
4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Dan Teknologi 60

4.3.2 Dukungan Publik 61
4.3.3 Sikap Dan Sumber Daya Kelompok Sasaran.....62
4.3.4 Dukungan Dari Pejabat 65
4.3.5 Komitmen Dan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana 65
4.3.6 Temuan studi proses implementasi dipengaruhi oleh variable-variabel diluar kebijaksanan 67
4.4 Langkah-langkah Dalam Proses Implementasi 68
4.4.1 Output kebijaksanaan dinas pelaksana.....68
4.4.2 Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan 69
4.4.3 Dampak nyata output kebijaksanaan.....69
4.4.4 Dampak output kebijaksanaan sebagai dipersepsi 70
4.4.5 Perbaikan mendasar dalam kebijakan pengembangan pariwisata 70
BAB V.....78
5.1 Kesimpulan 78
5.2 Saran dan Rekomendasi 79
DAFTAR PUSTAKA 81
LAMPIRAN.....83

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Penelitian yang memiliki kesamaan focus dan lokasi studi..... 6
Tabel I. 2 Keaslian Fokus dan Metode Penelitian..... 9
Tabel II. 1 Konsep Parameter dan Variabel Penelitian..... 24
Tabel III. 1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata..... 26
Tabel III. 2 Bukittinggi Tourissm Development Concept 36
Tabel IV. 1 Program dinas pariwisata Kota Bukittinggi 2022..... 53
Tabel IV. 2 Program dan kegiatan perangkat daerah dinas perdagangan Kota Bukittinggi 2022 53
Tabel IV. 3 Rencana Pembangunan Dinas Pelaksana..... 56
Tabel IV. 4 Profil Dinas Pelaksana..... 58
Tabel IV. 5 Perubahan sikap dan presepsi kelompok sasaran 63
Tabel IV. 6 Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Deliniasi Kawasan Pasar Atas, Kelurahan Benteng Ps. Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi 4
Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian 10
Gambar 1. 3 Diagram Alir 11
Gambar 1. 4 Tahap Analisis Menggunakan Triangulasi Data 17
Gambar 2. 1 Variabel Model Kebijakan (Mazmanian dan Sabatier, 1983)..... 21
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat 28
Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi.... 29
Gambar 3. 3 Peta Deliniasi Lokasi Studi Kawasan Pasar Atas 30
Gambar 3. 4 Kondisi Fisik Jalan Kawasan Pasar Atas 31
Gambar 3. 5 Kondisi Bangunan Kawasan Pasar Atas 32
Gambar 3. 6 Pasar Atas Tahun 1926..... 34
Gambar 3. 7 Pasar Atas Tahun 2017..... 34
Gambar 3. 8 Visi Bidang Kepariwisataan Kota Bukittinggi..... 35
Gambar 4. 1 Site Plan Kawasan Pasar Atas..... 37
Gambar 4. 2 Sebaran Los/PKL dan Toko di Kawasan Pasar Atas 43
Gambar 4. 3 Kondisi PKL/Los di Kawasan Pasar Atas..... 46
Gambar 4. 4 Kondisi Kebersihan Pasar Atas..... 47
Gambar 4. 5 Perbedaan site sebelum dan setelah penataan ulang 49
Gambar 4. 6 Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi 55
Gambar 4. 7 Pelayanan Tambahan Kawasan Pasar Atas..... 67

BAB I
PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pengertian wisata menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009 ialah berbagai jenis aktivitas wisata yang di dorong dengan pelayanan oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha. Pariwisata dapat meningkat pendapatan ekonomi dalam menghadapi perubahan aktivitas baik secara lokal maupun nasional. Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting di sektor ekonomi sebagai instrument pertumbuhan lapangan kerja dan devisa. (Alvionita et al., 2021)

Pariwisata dalam al-qur'an juga disebutkan berkali-kali salah satunya pada surat al-mulk ayat 15 yang berbunyi :

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Yang artinya "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. Allah menganjurkan umatnya melakukan perjalanan kemana pun yang dikehendaki untuk keperluan mata pencaharian dan wisata (tadabbur alam). Agar kita mengetahui bahwa allah memiliki berkehendak dalam urusan kita.

Salah satu kota yang terdampak langsung dari sektor pariwisata ialah Kota Bukittinggi yang menjadi salah satu wisata primadona baik di lokal maupun nasional. Keadaan masyarakat yang bertumpu pada sektor ini juga dilihat bisa berjalan dan mengikuti peningkatan sektor ini. Kota bukittinggi memiliki keindahan sumber daya alam dan sejarah ditopang dengan kekayaan budaya pada kondisi sosial yang ada di masyarakat yang menyokong kegiatan wisata sebagai tongak perekonomian dalam bentuk pertenunan dan bordiran, kuliner, kerajinan dan segala bentuk perdagangan. Walaupun Kota Bukittinggi mempunyai keterbatasan tertentu dalam geografis dan sumber daya alam, akan tetapi cepatnya pertumbuhan pariwisata ini menjadikan industri utama dan unggulan bagi Bukittinggi berdasarkan data terdapat 1.012.820 orang mengunjungi Kota Bukittinggi pada tahun 2019.

Dalam dokumen kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi tahun 2019 – 2025 tujuan kebijakannya yaitu mewujudkan optimalisasi pasar tradisonal dengan sasaran dukungan daya tarik sebagai kota belanja tradisional (Slow Shopping Tourism) dengan jenis wisata ekonomi kreatif yang mempresentasikan keunikan dan kearifan budaya lokal menjadi faktor pembeda wisata belanja yang ada di kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi, dan konsep pengembangan aktivitas wisata Pasar Atas yang menjadi pusat belanja yang tertata. Namun terjadi ketidakberhasilan implementasi pengembangan Pasar Atas diantaranya banyak pedagang yang belum tertata, tidak adanya rest area, jasa penitipan, pusat informasi, sehingga wisatawan yang datang hanya wisatawan lokal. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi terkait proses implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

1. 2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini ialah adanya gap antara tujuan penataan (output kebijakan yang diharapkan dalam dokumen rencana) dengan kondisi eksisting pasar setelah ditata, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian bagaimana implementasi kebijakan Pembangunan Kawasan pasar atas sebagai wisata belanja

1. 3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3. 1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi proses Implementasi Kebijakan Penataan dan Penertiban Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

1.3. 2 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ialah menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi berdasarkan:

a. Mudah tidaknya masalah tertangani
b. Kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses implementasi
c. Variable diluar kebijaksanaan yang berdampak pada proses implementasi
d. Tahap-tahap didalam proses implementasi

1. 4 Fokus Penelitian

Pemilihan fokus penelitian terkait evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas dan menemukan faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya implementasi kebijakan.

1.4. 1 Lokasi Studi Penelitian

Lokasi studi yang membatasi penelitian ini terletak di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi sebagai fokus lokasi memiliki luas 3,9 Ha atau 39.270 m^2 dan berada pada wilayah administrasi Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukitinggi. Secara administratif Kawasan Pasar Atas, Kelurahan Benteng memiliki batas wilayah :

- Barat : Kelurahan Kayu Kubu
- Utara : Kelurahan Bukit Apit Puhun
- Timur : Kelurahan Aur Tajungkang
- Selatan : Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

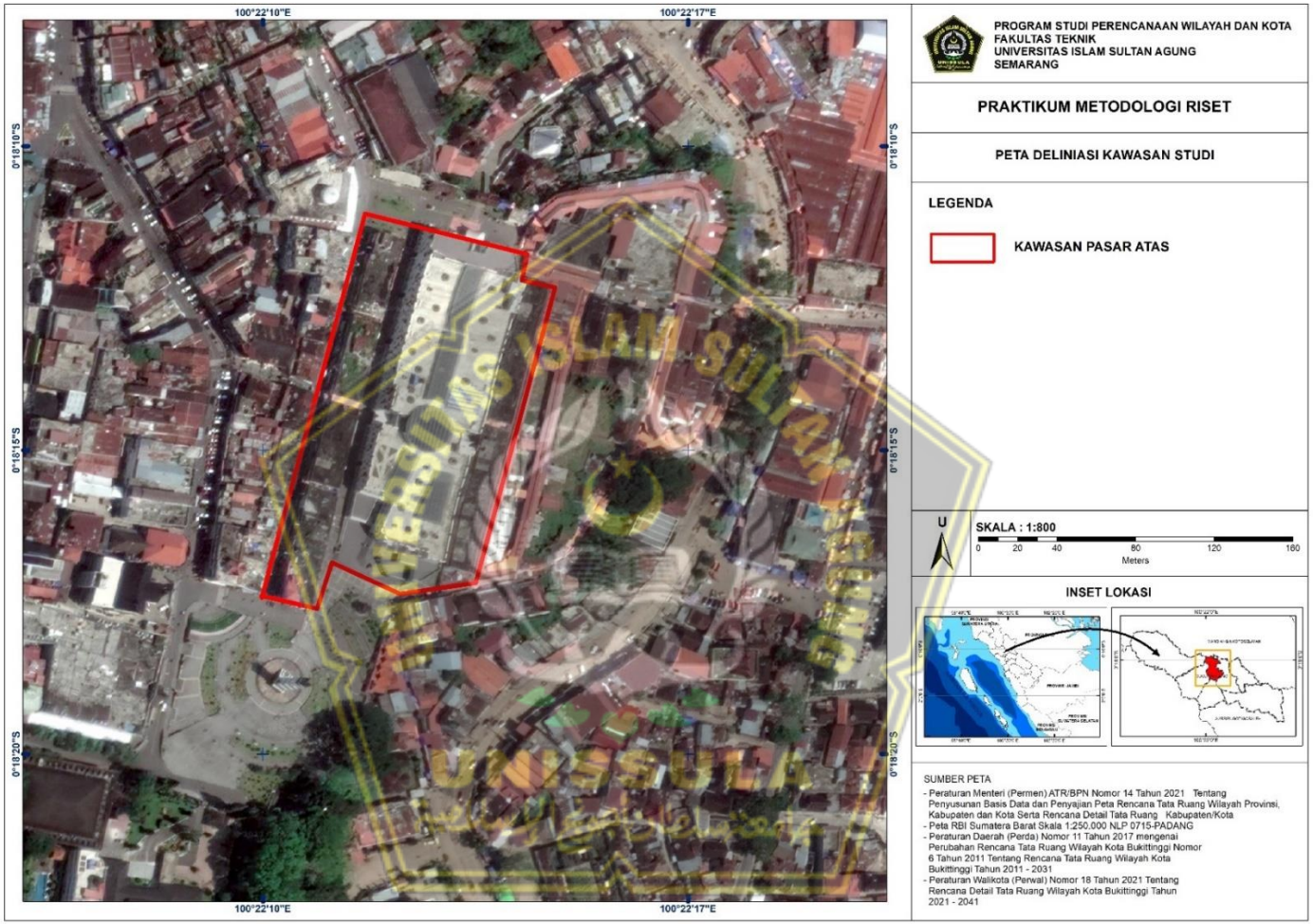

Gambar 1. 1 Peta Deliniasi Kawasan Pasar Atas, Kelurahan Benteng Ps. Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

1. 5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian dilakukan sebagai bahan pembanding dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Guna menjamin keaslian penelitian, peneliti mencoba mengkaji beberapa penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan dari segi pengembangan wisata.

Tabel I. 1 Penelitian yang memiliki kesamaan focus dan lokasi studi

No	Penulis	Judul	Jenis & Tahun	Metode	Hasil
1	Syiva Fauzlah	Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Dan Belanja di Provinsi Jawa Tengah	Tugas Akhir, 2019	Deskriptif kualitatif	Kab/kota yang memiliki daya Tarik sangat tinggi ada di 8 kab/kota Kategori potensial ada 4 kab/kota, kurang potensial ada 2 kab.
2	Sri Nurhayati Qodriatun	Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Karimunjawa	Jurnal, Vol. 9, Desember 2018	Deskriptif Kualitatif	Pengembangan kualitas pelaku usaha sudah ditingkatkan oleh dinas pelaksana. namun adanya masalah sampah, rusaknya terumbu karang, kekurangan air bersih, serta sosial budaya masyarakat yang berubah akibat dari pengembangan di Karimun jawa. Sehingga belum dapat dikatakan wisata di Karimunjawa berkelanjutan.
3	Ari Darmastuti, Vivi Alvionita, Robi, Cahyadi dan Syarief Makhia	Evaluasi Kebijakan Publik terkait Program Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lampung Timur (Studi Program Kalender *Event* Dan Festival Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018)	Jurnal Vol. 47, Juni 2022 : Hal. 114 – 141	Metode Campuran	Pengembangan wisata kesulurhan sudah baik melalui program peningkatan jumlah pengunjung dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

4	I Wayan Pantiasa	Evaluasi Pengelolaan di Desa Wisata Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan	Jurnal Vol. 10 No.2, Juni 2020	Deskriptif kualitatif	Wisata budaya dan alam yang dimiliki Desa Kaba-kaba memiliki daya Tarik yang tinggi. Namun, yang menjadi penghambat yaitu komitmen serta kemampuan sumber daya manusia.
5	I Putu Adi Suar	Evaluasi Pengembangan di Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar	Jurnal Volume. 5 No.2, 2020, 145 - 151	Deskriptif kualitatif. Teori evaluasi kebijakan dan pengembangan wisata	Pengembangan desa wisata Kerta belum optimal. Hal tersebut di indikasikan karena sosial budaya dan ekonomi yang masih rendah. Sehingga cara yang dilakukan untuk mengembangkan wis aini dengan pola partnership dalam mempromosikan, dan memperlihatkan keunikan produk yang ada.

6	Lutfi Firnandi Rachman, Indah Prabawati	Evaluasi Kebijakan Pengembangan di Kasawasan Agropolitan Desa Mayanggeneng, Kabupaten Bojonegoro	Jurnal Volume.1 No.1 Tahun 2012, 0 -216	Deskriptif kualitatif	Pada parameter daya guna sudah baik akan tetapi ada kelemahan pada parameter keberhasilan pelaksanaan program pengembangan di Desa Mayanggeneg.

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2023

Hasil kesimpulan dari tabel penelitian yang sama memiliki fokus di atas yang berkaitan erat dengan penelitian berjudul "Evaluasi Kebijakan Pengembangan pada Kawasan Agropolitan Desa Mayanggeneng" ini adalah penelitian Lutfi Firnandi Rahman dan Indah Prabawati, dimana penelitian tersebut menggunakan metode dan parameter pengembangan wisata yang sama tetapi lokasi penelitian berbeda. Sedangkan pada judul "Evaluasi Kebijakan Publik terkait Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur" penelitian dari Vivi Alvionita, Ari Darmastuti, Robi, Cahyadi dan Syarif Makya memiliki lokasi dan metode yang berbeda.

Tabel I. 2 Keaslian Fokus dan Metode Penelitian

Perbedaan	Alika Fathinnah	Lutfi Firnandi Rachman dan Indah Prabawati	Vivi Alvionita, Ari Darmastuti, Robi, Cahyadi dan Syarif Makha
Judul	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi	Evaluasi Kebijakan Pengembangan pada Kasawasan Agropolitan Desa Mayanggeneng	Evaluasi Kebijakan Publik Terkait Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur (Studi Pada Program Kalender *Event* Dan Festival Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018)
Lokasi	Pasar Atas Kota Bukittinggi	Desa Mayanggeneng	Kabupaten Lampung Timur
Metodologi	Deduktif Kualitatif Rasionalistik	Deskriptif kualitatif	Metode campuran

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2022

1. 6 Kerangka Penelitian

Di dalam kerangka ini akan membahas mengenai Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi yang akan digambarkan Secara diagramatis adalah sebagai berikut :

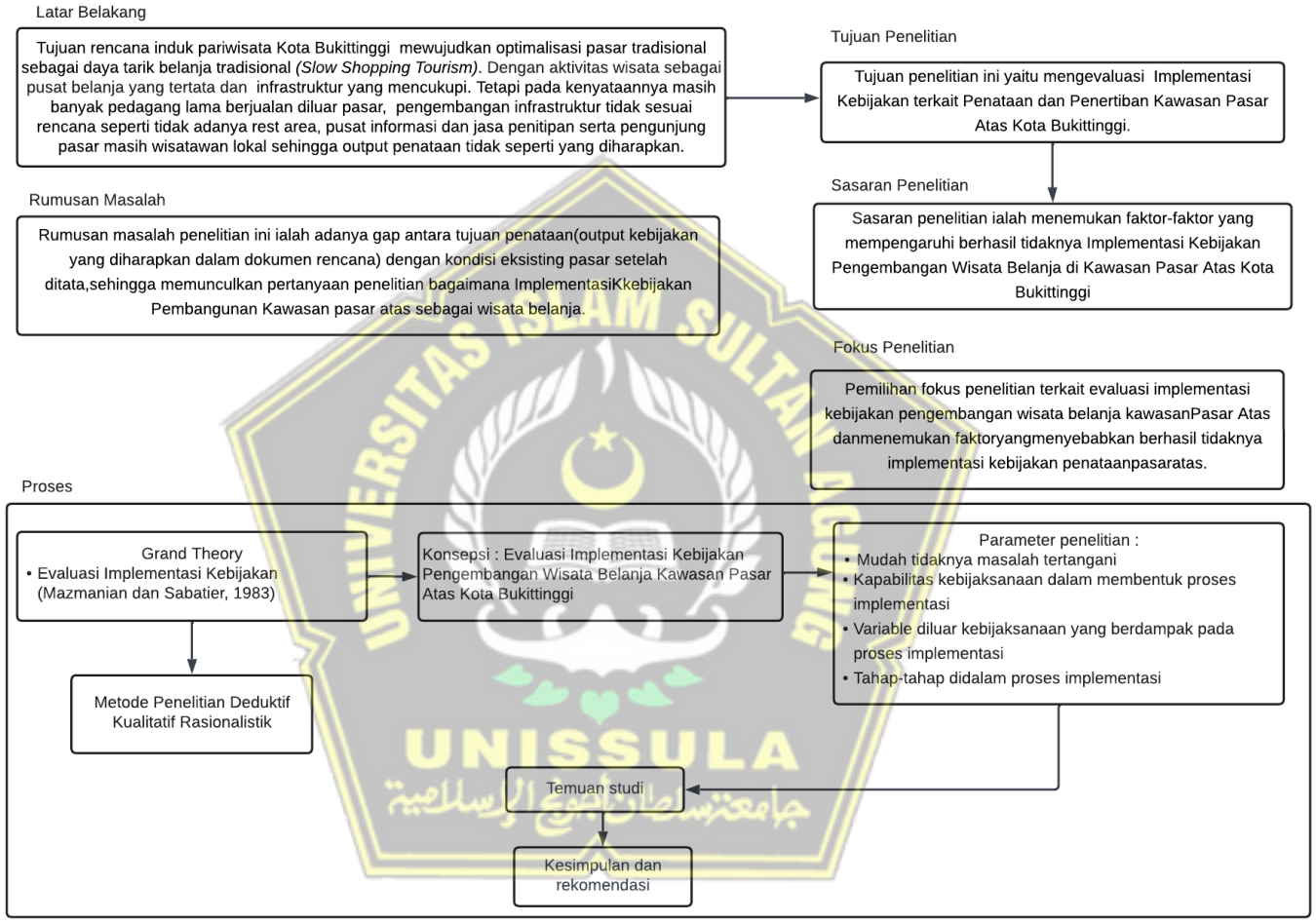

Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian

1. 7 Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi" menggunakan pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik. Metode deduktif metode untuk menguji teori kemudian dicocokkan pada kasus yang ada di lapangan. Pemilihan metode deduktif dikarenakan pada penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja memakai dasar teori yang ada. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung (*observasi*) dalam meng*cross-check* kesinambungan antara teori dan empirik.

Penelitian rasionalistik berangkat dari rangka teoritis pada hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, teori yang diketahui dan pentingnya pemikiran ahli, tetapi menimbulkan pertanyaan yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Penelitian kualitatif rasionalistik ini mencita-citakan pendekatan holistik berupa grand concept yang diterjemahkan ke dalam materialisme, menelaah objek tanpa mengeluarkannya dari konteksnya, dan menerjemahkan hasil penelitian ke dalam grand concept. (Basuki, 2019)

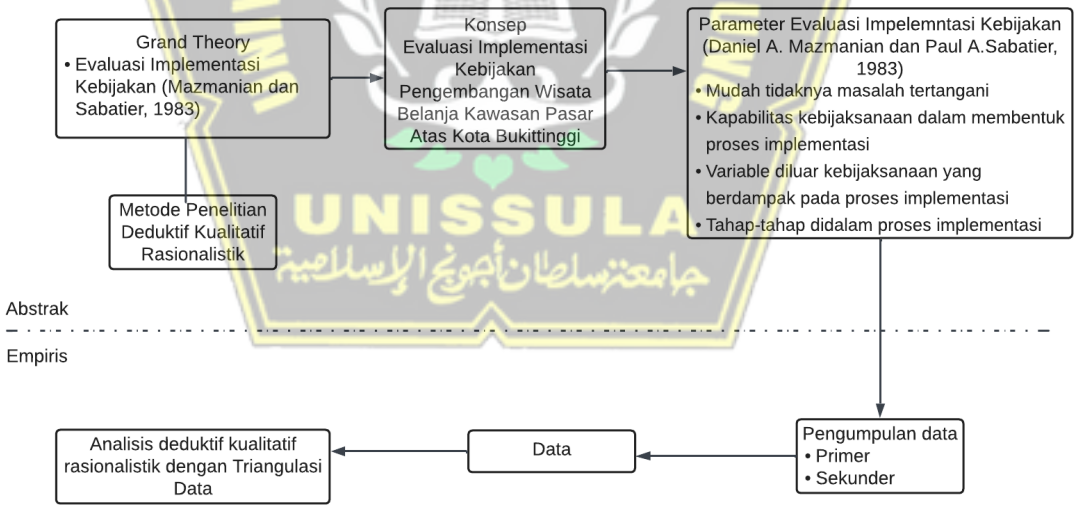

Gambar 1. 3 Diagram Alir

1.7.2. Tahap Penelitian

1.7.2.1. Tahap Persiapan Penelitian

Dalam tahapan persiapan penelitian merupakan tingkat awal sebuah penelitian. Tahapan ini dilaksanakan untuk memahami data yang dibutuhkan untuk

selanjutnya pembuatan tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Tahap dalam persiapan yaitu perumusan masalah, tujuan, sasaran dan lokasi penelitian, literature Review, penghimpunan data, serta menyusun metode pelaksanaan penghimpunan data. Tahap persiapan penelitian ini yaitu :

1. Rumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran

Dalam konsep pengembangan aktivitas wisata Pasar Atas menjadi pusat belanja yang tertata. Namun terjadi ketidakberhasilan implementasi pengembangan Pasar Atas diantaranya banyak pedagang yang belum tertata, tidak adanya rest area, jasa penitipan, pusat informasi, sehingga wisatawan yang datang hanya wisatawan lokal. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi terkait proses implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi proses Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi dilihat dari Mudah tidaknya masalah tertangani, kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses implementasi, variable diluar kebijaksanaan yang berdampak pada proses implementasi dan tahap-tahap didalam proses implementasi.

2. Fokus Lokasi

Pemilihan fokus lokasi didasari oleh beberapa faktor seperti permasalahan, keterjangkauan lokasi dan kesiapan referensi literature. Pemilihan fokus penelitian terkait evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja kawasan Pasar Atas dan menemukan faktor yang menyebabkan berhasil tidaknya implementasi kebijakan penataan pasar atas.

3. Melakukan kajian Literature Review

Kajian literature yang digunakan mengenai evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja. Dilakukannya kajian literature review diharapkan dapat meringankan penyusunan metode.

4. Pemilihan Pendekatan dan Parameter Penelitian

Parameter dalam penelitian ini berangkat dari teori mendukung “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi” dengan metode deduktif kualitatif rasionalistik.

5. Kebutuhan Data

Kebutuhan data terdiri dari kebutuhan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan di lapangan. Data sekunder didapatkan melalui literatur atau dokumen dari dinas pelaksana terkait.

6. Tahap Akhir (Penyusunan Teknis dan Pelaksanaan Survey)

Pada tahap ini adalah tahap perumusan teknik mulai dari penghimpunan data, penggolongan dan penyampaian data, pemilihan responden, rancangan penelitian, pengamatan, dan form wawancara.

1.7.2.2 Tahap Penghimpunan Data

Penghimpunan data dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Penghimpunan pada tahap ini dilakukan untuk memperoleh data yang seimbang dengan variabel yang dipilih, penghimpunan data bisa berasal dari berbagai sumber yakni sumber primer yaitu sumber data yang secara nyata memberikan data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data. (Sugiyono, 2016).

Teknik penghimpunan data merupakan teknik yang dipakai untuk mendapatkan data berupa fakta sehingga melekat pada sesuatu hal (Yunus, 2016). Pada penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi memakai teknik penghimpunan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung berdasarkan keadaan lapangan. Teknik pengklasifikasian data secara primer dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi (Pengamatan Lapangan)

Pengamatan merupakan pengumpulan catatan lapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung sebagai seorang pengamat. Objek observasi pada kajian ini berlokasi di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Observasi/pengamatan langsung terhadap kondisi Kawasan Pasar Atas dengan mecocokkan komponen terkait evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata. Adapun perlengkapan kegiatan pengamatan lapangan seperti alat potret, dan catatan buku survey.

b. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara dapat dilaksanakan secara terpola, langkah-langkah wawancara menurut Kvale dan Brinkmann (2009) memaparkan tujuh tahapan dalam wawancara yaitu pertama adalah menyampaikan tema wawancara, desain studi, pelaksanaan wawancara (menulis dan merekam hasil wawancara), analisis data, verifikasi dan validasi, reliabilitas dan pelaporan studi.

Dalam teknik ini memerlukan form pertanyaan tentang parameter penelitian yang akan digali lebih mendalam. Selain itu dalam teknik wawancara juga menentukan siapa saja yang akan di wawancarai. Untuk sampel yang digunakan yaitu jenis NonProbability Sampling yaitu dengan menggunakan Metode Purposive Sampling. Alasan menggunakan Purposive Sampling ini menggunakan sampling yang sesuai dengan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti, dimana tidak semua orang terpilih untuk menjadi responden. Responden yang dimaksud adalah responden yang memiliki kriteria yang cocok untuk penelitian evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

Dalam penelitian ini sasaran kriteria yang dimaskud adalah lembaga/orang/organisasi yang mengetahui proses implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas baik pemerintahan maupun non pemerintahan seperti Dinas Koperasi UKM Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas pekerjaan Umum Penataan Ruang serta non pemerintah yaitu pelaku usaha dan wisatawan yang berada di Kawasan Pasar Atas, dengan pemilihan sampel menggunakan Teknik Sampling Jenuh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah menghimpun data mengenai variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2014). Adapun data

yang didapatkan dengan metode dokumentasi berupa foto terkait masalah penelitian, yang pada hal ini pada ruang lingkup wilayah Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan infromasi dari tubuh pengeola yang terkait. Informasi ini berupa file kebijakan, laporan ataupun dokumen yang dipublikasikan atau tidak. Data yang memiliki keterikatan pada penelitian ini diperoleh dari dinas pelaksana. Adapun data sekunder sudah tersedia dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Kategori data tersebut adalah :

a. Data bentuk teks berupa dokumen, pengumuman, artikel, jurnal dan berita
b. Data bentuk gambar berupa foto
c. Data bentuk suara berupa hasil rekaman
d. Kombinasi teks, gambar dan suara berupa video

1.7.2.3 Tahap Penggolongan dan Penyampaian Data

Pada tahap penggolongan dan penyampaian data dilakukan agar data-data agar rapi dan jelas sehingga dapat dilakukan analisis dengan sistematis, adapun prosedur penggolongan data yang akan dilakukan sebagai berikut::

1. Teknik Penggolongan Data

Data yang didapatkan akan digolongkan lewat rekapitulasi dan diurutkan sesuai dengan kebutuhan data dan informasi atau dibuat basis data guna mempermudah pengolahan selanjutnya.

a. Penyuntingan data

Penyuntingan ialah aksi mengkoreksi data yang terkumpul agar meminimalisir kesalahan saat mencatat data eksisting sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menganalisis data.

b. Pengkodean data

Pemberian kode bertujuan memberi karakteristik khusus pada narasumber. Bertujuan untuk mengelompokkan data dengan lengkap dan detail sehingga menghasilkan kesimpulan. Dalam studi ini, pengamat hendat melakukan kodefikasi dengan kriteria yang peneliti tentukan, yakni :

1) Nama inisial : Instansi OPD atau W untuk wisatawan

2) Memberikan note : OPD-I / W -I untuk note bagian 1
3) Tanggal wawancara : 11/6/23 (Tanggal/bulan/tahun)

2. Teknik Penyampaian Data
   a. Deskriptif merupakan penjelasan data kualitatif yang berupa kecenderungan, pendapat obyek yang diteliti dalam bentuk semi terbuka.
   b. Tabel merupakan bentuk penyampaian data yang sederhana dan mudah dipahami.
   c. Peta merupakan penyampaian data dan informasi dalam bentuk gambaran keruangan secara terpola agar mengetahui lokasi detail dalam skala tematik dari data yang diperoleh. Pengolahan peta pada penelitian ini terdiri dari peta administrasi wilayah.
   d. Foto merupakan penyampaian tampilan berupa gambar dari hasil survey atau pengamatan obyek secara langsung.

1.7.2.4 Tahap Analisis

Tahap analisis ialah proses menggolongkan dan menghimpun data penelitian agar memenuhi tujuan dan sasaran. Teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi adalah metode Teknik Deskriptif Kualitatif dengan Triangulasi Data.

Analisis kualitatif dilakukan pada pengamatan terhadap sumber terkait dengan cara menggambarkan data yang terkumpul apa adanya. Sedangkan Teknik Triangulasi Data adalah menggali kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai sumber seperti dokumen arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

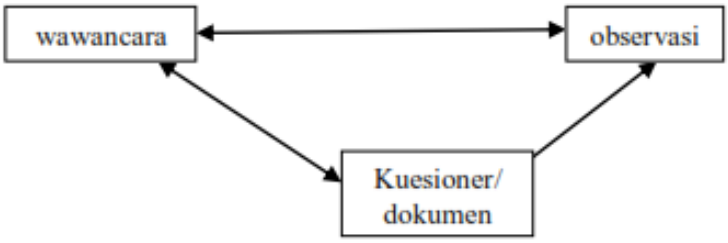

Gambar 1. 4 Tahap Analisis Menggunakan Triangulasi Data

1.7.2.5 Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan digunakan setelah semua data dihimpun, disajikan dan dianalisis agar memenuhi tujuan dan sasaran dalam penelitian. Penulisan hasil berkaitan dengan jenis dan bentuk laporan yang dituliskan secara runtut, sistematik dan disajikan secara informatif. Berikut merupakan teknik penulisan :

1. Penjelasan penulisan dilakukan secara informal agar memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Penulisan dari pemaknaan tetap didasarkan dari data.
3. Data yang dimasukkan cukup dan sesuai dengan fokus penelitian, agar terdapat batasan penelitian.
4. Membuat catatan untuk setiap tahap kegiatan agar sesuai dengan fokus penelitian.

1.8 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penyusunan laporan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I memuat penjelasan menegnai latar belakang, rumusan dari permasalahan, tujuan dan sasaran, fokus dan lokasi studi dari penelitian sebelumnya, keabsahan, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Memuat acuan yang berkaitan dengan teori Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI

Memuat keadaan lapangan pada wilayah studi baik secara luas ataupun yang berkaitan dengan tujuan studi. Bab ini juga berisi data – data yang telah berhasil dikumpulkan selama penelitian.

BAB IV ANALISIS

Memuat perbandingan antara data dengan teori berbentuk kualitatif sesuai dengan bentuk analisa yang digunakan. Dalam beberapa hal ini juga bisa dikemukakan keterkaitan hasil analisis yang satu dengan lainnya.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Memuat kesimpulan secara ringkas yang menjawab tujuan penelitian. Rekomendasi yang merupakan saran dari peneliti yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait, catatan mengenai kelemahan penelitian yang bersangkutan serta rekomendasi studi lanjutan dengan lokasi atau fokus studi.

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (1983) penilaian atau penaksiran. Evaluasi menurut Akbar & Mohi (2018) adalah proses yang sistematis dengan prosedur dan standar yang ditetapkan dalam menentukan bagaimana pembuat kebijakan mengimplementasikan program dan kebijakan. evaluasi tersebut kemudian menghasilkan dampak dari program kebijakan tersebut sehingga dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan selanjutnya. (Akbar & Mohi, 2018)

Evaluasi menurut Subarsono (2006 ,113) yang dikutip dari Wicaksana (2016) dilakukan agar mengetahui tingkat kinerja kebijakan, seberapa baik kebijakan mencapai tujuannya. Penilaian ini akan membantu menginformasikan kebijakan masa depan yang lebih baik. (Wicaksana, 2016a)

2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008) yaitu mengetahui apa yang terjadi setelah program dikatakan berlaku. Peran penting dari implementasi kebijakan, adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi antara lain meliputi: Mudah tidaknya masalah tertangani, kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses implementasi, dan variable diluar kebijaksanaan yang berdampak pada proses implementasi.(Pramono,2020)

Implementasi kebijakan menurut Nugroho pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan mencapai tujuannya. (Apriandi, 2017)

Evaluasi implementasi kebijakan dalam penelitian ini ialah penilaian proses implementasi kebijakan yang diterapkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan dengan parameter mudah tidaknya masalah tertangani, kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses

implementasi, dan variable diluar kebijaksanaan yang berdampak pada proses implementasi.

2.3 Parameter dan Variabel Evaluasi Implementasi Kebijakan

Parameter dan variabel yang menggambarkan metriks untuk mengevaluasi implementasi kebijakan menurut Daniel A.Mazmanian dan Paul A. Sabatier, (1983) yaitu :

a. Mudah tidaknya masalah tertangani
    1. Kesukaran-kesukaran teknis
    2. Keragaman perilaku kelompok sasaran
    3. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
    4. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
b. Kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses implementasi
    1. Kejelasan konsistensi tujuan
    2. Digunakannya teori kausal yang memadai
    3. Ketepatan alokasi sumber dana
    4. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
    5. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
    6. Rekrutimen pejabat pelaksana
    7. Akses formal pihak luar
c. Variabel diluar kebijaksanaan yang berdampak pada proses implementasi
    1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
    2. Dukungan publik
    3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
    4. Dukungan dari pejabat atasan
    5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana
d. Tahap-tahap dalam proses implementasi
    1. Output kebijaksanaan badan-badan pelaksana
    2. Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan
    3. Dampak nyata output kebijaksanaan
    4. Dampak output kebijaksanaan sebagai dipersepsi
    5. Perbaikan mendasar dalam undang-undang

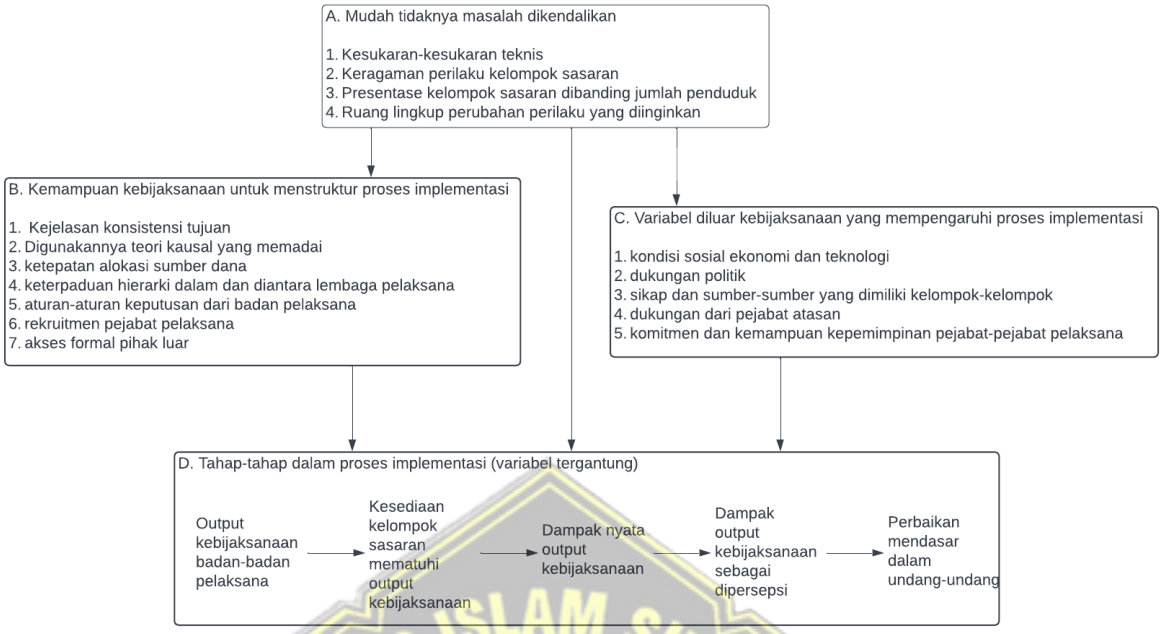

Gambar 2. 1 Variabel Model Kebijakan (Mazmanian dan Sabatier, 1983)

2.4 Pengertian Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata menurut (Suwena & Widyatmaja, 2017) adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi target pariwisata dengan mencapai keterpaduannya dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pengembangan wisata menurut Barreto dan Giantari (2015:34) merupakan upaya dalam mengoptimalkan atau meningkatkan destinasi agar lebih menarik dilihat dari tempat atau elemen-elemen yang ada didalamnya agar menarik kunjungan wisatawan. (Warf, 2014)

Pengembangan kepariwisataan dikutip dari Alwi Hasan dkk (2016) tidak luput dari pembangunan berkelanjutan, pembangunan destinasi atraksi wisata dilakukan dengan mengelola, mengontrol, dan menciptakan destinasi-destinasi baru sebagai atraksi baru, pembangunan destinasi dan atraksi.

Pengembangan suatu destinasi pariwisata menurut (Chris Cooper, David Gilbert, Alan Fyall, John Fletcher 1993) dikutip dari (Suardika, 2020) harus

terdapat empat unsur yaitu *Attraction, Access, Amenities, Ancillary services* yang disingkat dengan formulasi 4A.

1. Attraction : potensi utama sebuah wisata yang mempunyai kekhasan dan daya tarik. adapun atraksi yang menarik kedatangan wisatawan :
   a. Sumber kekayaan alam (nature),
   b. Kekayaan budaya,
   c. Kekayaan buatan.

   Kehadiran atraksi menjadi alasan dan motivasi bagi pengunjung. Daya tarik dapat berwujud keelokan dan keasrian alam, budaya lokal, warisan bersejarah, kekayaan buatan seperti tempat hiburan atau belanja.
2. Accesbility : kemudahan dalam mencapai tempat wisata tersebut. Seperti alat dan kemudahan menuju tempat wisata berupa ketersediaan transportasi, Akses dan petunjuk jalan merupakan bagian penting. Ada begitu banyak daerah di Indonesia dengan kekayaan alam dan budaya yang dapat diexplore pengunjung, namun banyak juga daerah yang tidak dapat dijangkau, sehingga meskipun dipromosikan, tidak banyak pengunjung yang mengexplore. konektivitas jalan tidak memadai jika transportasi tidak tersedia. Transportasi umum sangat penting bagi pelancong independen. Hal ini dikarenakan umumnya dari mereka merencanakan perjalanannya sendiri tanpa agen perjalanan sehingga amat bertumpu pada fasilitas umum.
3. Amenity: segala bentuk fasilitas penunjang kegiatan pariwisata yang mencakupi fasilitas utama dan penyokong berupa aksesibilitas dan prasarana wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.
4. Ancilliary: ialah tambahan pendukung wisata seperti organisasi atau pihak yang menggelola destinasi wisata. Sehingga akan memberikan keunggulan stakeholder yang bersinggungan yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, pelaku usaha. (Setiyani, 2020)

Pengembangan wisata pada penelitian ini ialah usaha pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan dan mempromosikan obyek wisata dengan cara memajukan ekonomi masyarakat dan menarik atensi wisatawan.

2.5 Tujuan Pengembangan Wisata

Tujuan Pengembangan sarana wisata menurut Tirtadinata dan Fachruddin (2010: 28-30) adalah:

a. Mengoptimalkan nilai seni dan keindahan alam
b. Memaksimalkan pengembangan tempat wisata
c. Menciptakan nilai wisata
d. Peningkatan kegiatan ilmiah dan perkembangan ilmu pengetahuan
e. Memaksimalkan keuntungan ekonomi

Adapun manfaat ekonomi bagi masyarakat menurut Warf (2014) :

a. Luasnya lapangan kerja baru bagi masyarakat
b. Meningkatnya pendapatan bagi penduduk setempat
c. Meningkatnya popularitas wisata
d. Meningkatnya produksi

Adapun manfaat ekonomi untuk wisata menurut Warf (2014) :

a. Peningkatan pendapatan dari atraksi
b. Peningkatan sarana dan prasarana di destinasi wisata
c. Meningkatnya kemauan untuk turut serta melestarikan potensi daya tarik wisata, melestarikan lingkungan dan manfaat yang dicapai
d. Meningkatkan mutu aksesibilitas dalam pengembangan suatu objek wisata. (Warf, 2014)

2.6 Pengertian Wisata Belanja

Pariwisata Menurut (Wicaksana, 2016) merupakan aktifitas kunjungan yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat rekreasi. Pariwisata mencakup beragam jenis seperti wisata Sejarah, budaya, alam, religi, dan belanja.

Wisata belanja menurut Wicaksana merupakan bagian kegiatan wisata yang dilakukan oleh sebagian orang dalam perjalanan kegiatan wisata dengan wisata belanja. Wisata belanja adalah setiap aktifitas kunjungan yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok dengan tujuan melihat-lihat atau membeli kebutuhan. Wisata Belanja ialah setiap kegiatan wisata yang memanfaatkan kawasan

perdagangan eceran sebagai tempat kunjungan rekreasi dan kegiatan belanja untuk keperluan perjalanan wisata. (Wicaksana, 2016).

Wisata belanja dalam penelitian ini ialah suatu aktivitas mendatangi tempat atau pusat belanja sebagai sarana rekreasi atau keperluan perjalanan wisata yang dapat dilakukan oleh individu atau kelompok.

2.8 Konsepsi Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja

Evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja dalam penelitian ini adalah penilaian proses implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja yang diterapkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja dengan parameter mudah tidaknya masalah tertangani, kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses implementasi, dan variable diluar kebijaksanaan yang berdampak pada proses implementasi.

Tabel II. 1 Konsepsi Penelitian Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas

No	Konsepsi	Parameter	Variabel
1.	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas	1. Mudah tidaknya masalah dikendalikan	- Kesukaran-kesukaran secara teknis - Keragaman perilaku kelompok sasaran - Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk - Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
		2. Kapabilitas kebijaksanaan dalam membentuk proses implementasi	- Kejelasan konsistensi tujuan - Digunakannya teori kausal yang memadai - Ketepatan alokasi sumber dana

No	Konsepsi	Parameter	Variabel
			- Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana - Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana - Rekrutimen pejabat pelaksana - Akses formal pihak luar
		3. Variabel diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi	- Kondisi sosial ekonomi dan teknologi kelompok sasaran - Dukungan publik/kelompok sasaran - Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok sasaran - Dukungan dari pejabat atasan - Komitmen dan kemampuan kepemimpinan dinas pelaksana
		4. Tahap-tahap dalam proses implementasi	- Output kebijaksanaan dinas pelaksana - Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan - Dampak nyata output kebijaksanaan - Dampak output kebijaksanaan sebagai dipersepsi - Perbaikan mendasar dalam program kebijakan

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2023

BAB III
GAMBARAN WILAYAH STUDI

3. 1 Gambaran Kawasan Pasar Atas

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bukittinggi, Kawasan Pasar Atas menjadi salah satu wisata belanja dengan mempresentasikan kearifan budaya lokal sebagai industri ekonomi kreatif Kota Bukittinggi. Selain itu, Kawasan Pasar Atas merupakan pasar yang pertama kali ada pada jaman hindia belanda. Belanda mendirikan pasar secara tetap yang disebut *loih galuang* pada tahun 1900.

Pasar Atas diatur oleh Dinas Pengelolaan Pasar atau saat ini dinas perdagangan Kota Bukittinggi. Pasar Atas ialah tempat belanja produk khas Kota Bukittinggi, pasar yang menggabungkan wisata sejarah dan budaya dengan aktivitas berbelanja. Pasar yang menjadi pusat ekonomi masyarakat Luhak Agam ini ialah pasar eceran dengan pola berdagang secara tradisional berciri khas, diwarnai "ago ma'ago" atau tawar menawar. Juga terdapat Los/PKL dengan beragam dagangan berupa makanan dan handmade.

Tabel III. 1 Daya Tarik dan Sumber Daya Wisata

Informasi Umum	
Lokasi dan Batas	Berjarak kurang lebih 400 meter dan bertempat di Jalan Minangkabau
Jenis Objek Wisata	Wisata Buatan
Deskripsi Objek	Sentra perbelanjaan beraneka macam kain sulaman, mukena, pakaian, souvenir, songket serta aksesoris.
Daya Tarik (Atraksi)	
Daya Tarik Wisata	Pusat belanja pakaian, souvenir dan aksesoris
Keunikan/kelangkaan	Berada di tengah Kota
Keragaman daya tarik	Lokasi strategis dan berdekatan dengan wisata seperti Jam Gadang, Benteng, Kebun Binatang Kinantan, Pasar Lereng, Istana Bung Hatta dan Los Lambuang.

Informasi Umum	
Kondisi lingkungan, penataan ruang dan kemungkinan pengembangan	Kurang baik, karena toko tidak memedulikan kebersihan lokasi
Aksesibilitas	
Kualitas jalan di dalam wisata	kualitas jalan berupa semen dan banyak Lobang
Ketersediaan moda transportasi	Tidak baik, karena harus berhenti sekitar 450 meter dari Hotel Novotel dan dari Tugu Pahlawan Tak Dikenal
Sarana dan Prasarana (Amenitas)	
Rumah Makan	Ada, Simpang Raya, Texas Chicken, Los Lambuang, KFC, Pizza Hutt,dan warung kaki lima yang berada di antara Pasar Atas dan jenjang empat puluh.
Toilet	Perlu dirawat kebersihannya

Sumber : RIPPARKO Bukittinggi 2019 - 2025

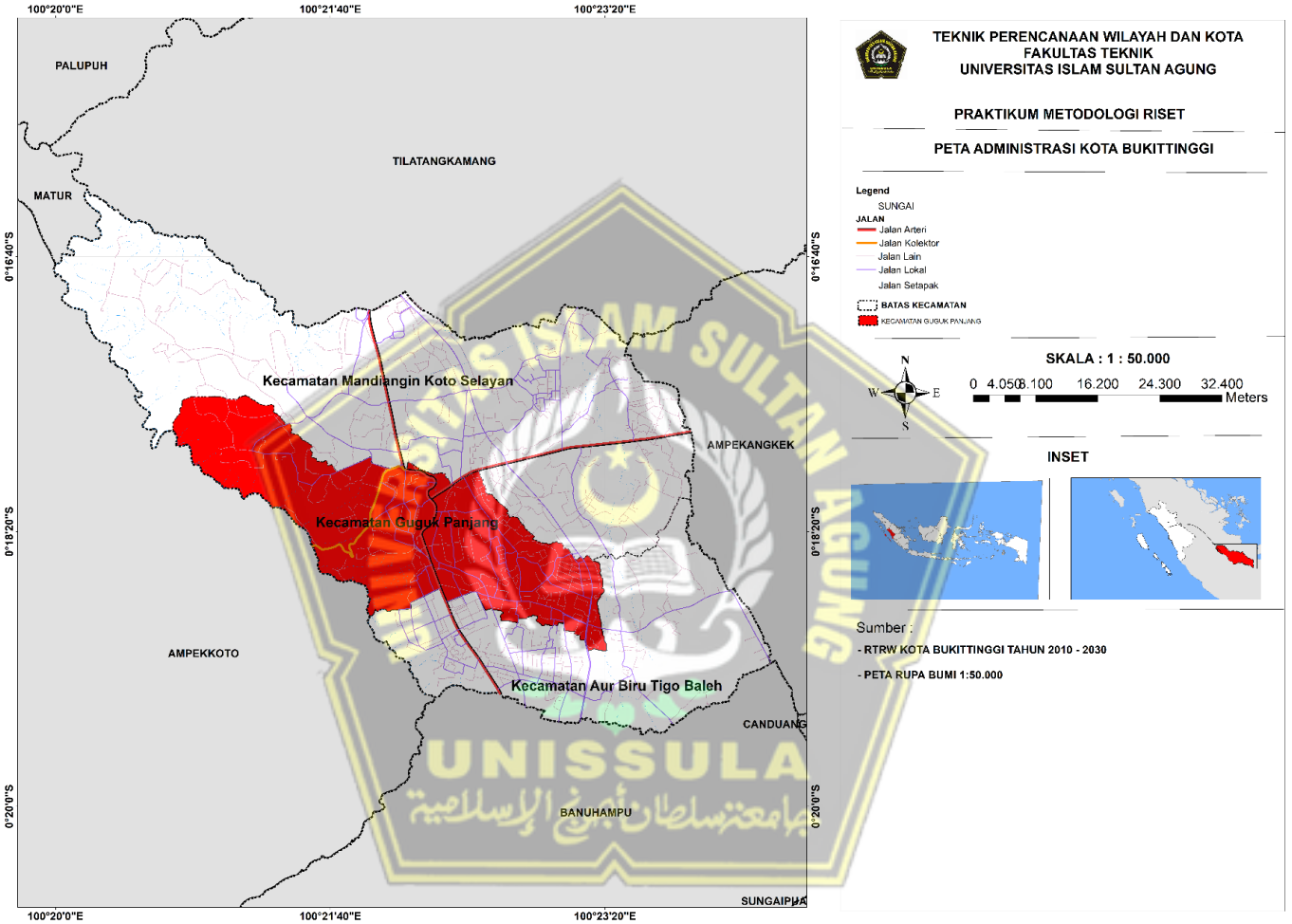

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat

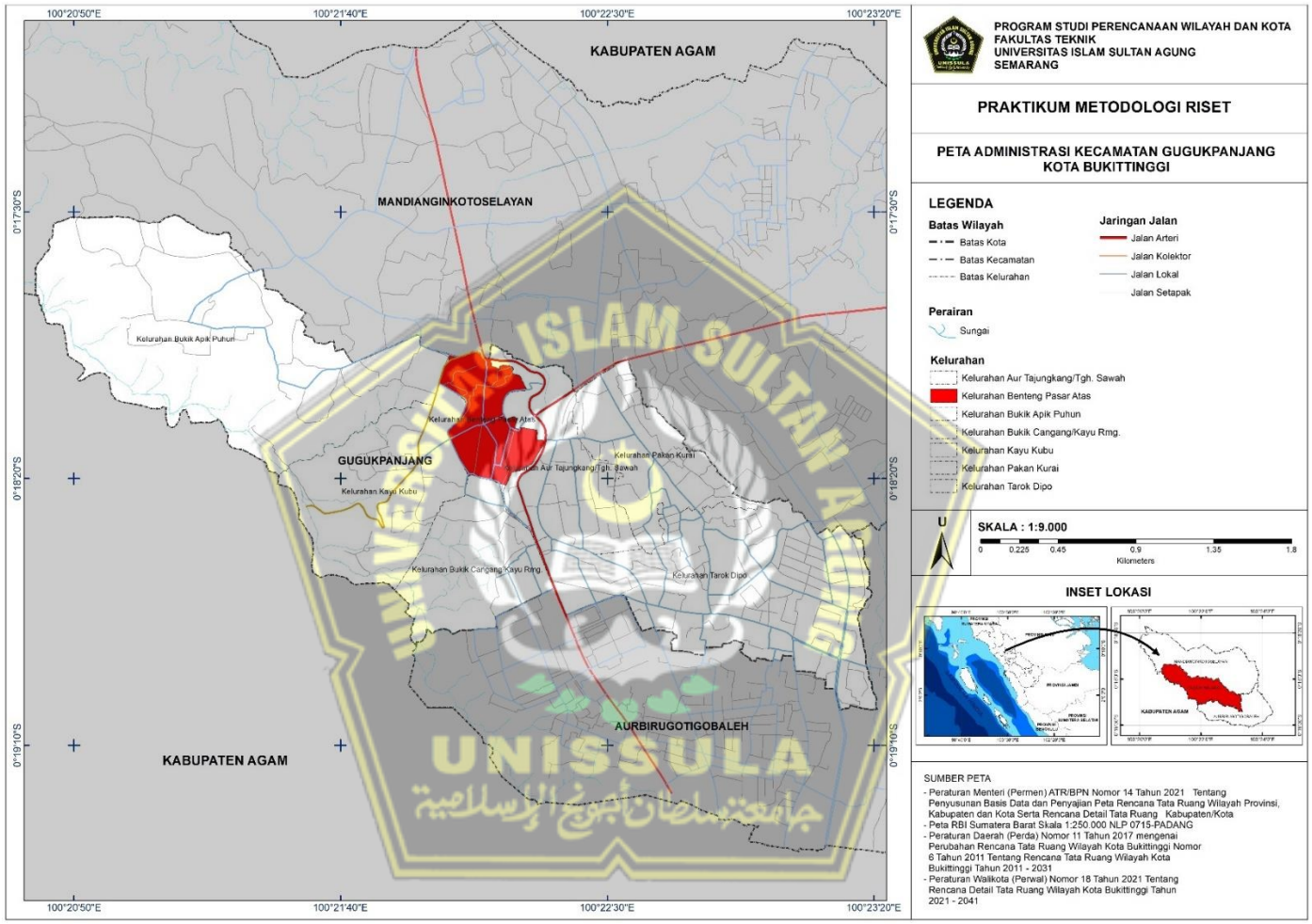

Gambar 3. 2 Peta Administrasi Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Gambar 3. 3 Peta Deliniasi Lokasi Studi Kawasan Pasar Atas

3. 2 Kondisi Fisik

a. Jalan

Aksesibilitas merupakan hal yang penting dalam pengembangan wisata. jalan merupakan elemen kota yang sangat mudah diketahui, sebab semua orang berjalan sambal mengamati Pasar Atas. kualitas jalan yang ada di kawasan Pasar Atas mayoritas cukup baik, nyaris semua jalan yang ada berbentuk jalan aspal dan paving dengan dilengkapi lampu penerangan jalan dan perabot jalan, berbeda dengan sebelum adanya rekonstruksi pada tahun 2019 kondisi jalan kurang baik dan kurang penerangan.

Gambar 3. 4 Kondisi Fisik Jalan Kawasan Pasar Atas

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

b. Bangunan

Bangunan sebagai pengenal yang dapat dilihat oleh pengunjung sesuatu yang merupakan dasar kawasan. Bangunan besar, terlihat dan bersejarah mayoritas dijadikan pengunjung sebagai tumpuan (landmark). Pada Kawasan Pasar Atas, bangunan yang sudah direkonstruksi terlihat lebih baik dari segi arsitektur dan penataannya. Kawasan Pasar Atas juga berhadapan dengan Jam Gadang yang merupakan Landmark Kota Bukittinggi.

a. Pasar Atas tampak depan

b. Pasar Atas tampak dalam

c. Kawasan Pasar Atas

Gambar 3. 5 Kondisi Bangunan Kawasan Pasar Atas

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023

3.3 Sejarah Kawasan Pasar Atas

Sejarah pasar atas di Kota Bukittinggi memiliki akar yang cukup dalam dalam perjalanan sejarahnya. Bukittinggi merupakan salah satu kota penting di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dan pasar atas merupakan salah satu pusat perdagangan tradisional di kota ini.

Pasar atas Bukittinggi sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada awalnya, pasar ini dianggap sebagai pusat ekonomi dan perdagangan yang strategis di Bukittinggi. Letaknya yang berada di kawasan Pasar Atas menjadi tempat aktivitas perdagangan yang ramai bagi penduduk lokal maupun pendatang.

Dalam sejarahnya, pasar atas ini mengalami perkembangan dan peningkatan status. Pada tahun 1898, rezim Kolonial Belanda menyatakan Bukittinggi sebagai ibu kota pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Tengah. Hal ini memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan di pasar atas.

Pasar atas Bukittinggi juga memiliki peranan penting dalam perkembangan budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Pasar ini menjadi tempat interaksi sosial, tempat berkumpulnya orang-orang, dan juga menjadi pusat kegiatan budaya seperti pertunjukan kesenian tradisional.

Selama masa penjajahan Jepang, pasar atas Bukittinggi juga mengalami perubahan. Pada masa itu, ada perubahan dalam manajemen dan sistem operasional pasar atas. Pasar ini juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang diatur oleh kebijakan pemerintah Jepang.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pasar atas tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan dan ekonomi yang penting di Bukittinggi. Seiring dengan perkembangan perkotaan dan kegiatan ekonomi, beberapa peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung dilakukan untuk memperluas dan memperbarui pasar atas.

Pasar atas Bukittinggi terus berkembang hingga saat ini, mengalami modernisasi dan peningkatan fasilitas. Pasar ini menjadi tempat yang menawarkan berbagai jenis barang dagangan, seperti produk makanan, tekstil, kerajinan, dan banyak lagi.

Sejarah pasar atas Bukittinggi mencerminkan perjalanan perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Secara keseluruhan, pasar atas ini telah menjadi simbol penting dalam kehidupan sehari-hari dan budaya kota Bukittinggi. Pasar Atas dikelola oleh dinas perdagangan kota Bukttinggi dan dibawah lindungan pemerintahan kota.

Pada tahun 2017 Pasar Atas mengalami kebakaran menyebabkan sebanyak 334 petak toko terbakar. Hal ini menghambat aktivitas pedagang. Pemerintah Kota melakukan rekonstruksi Pasar Atas.yang memerlukan waktu 2 tahun. Pada tahun 2019 pemerintah pusat, pemerintah kota bukittinggi serta Kementrian Pekerjaan Umum meresmikan Kembali Pasar Atas yang telah direkonstruksi.

Gambar 3. 6 Pasar Atas Tahun 1926

Gambar 3. 7 Pasar Atas Tahun 2017
Sumber : Google, 2023

3. 4 Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi Sebagai Wisata Belanja Dalam Dokumen Kebijakan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bukittinggi Tahun 2019 – 2025

Kawasan Pasar Atas termasuk ke zonasi Kawasan utama pariwisata juga termasuk Objek wisata buatan. penyokong perekonomian Kota secara konvensional dalam pertenunan dan bordiran, kuliner, souvenir, perdagangan dan kerajinan lainnya. Berdasarkan visi dan misi yaitu :

"**Menjadi Destinasi Wisata Convention dan Exhibition (CONEX) yang unggul dan berdaya saing, berbasis alam dan sejarah di Indonesia bagian barat tahun 2025**".

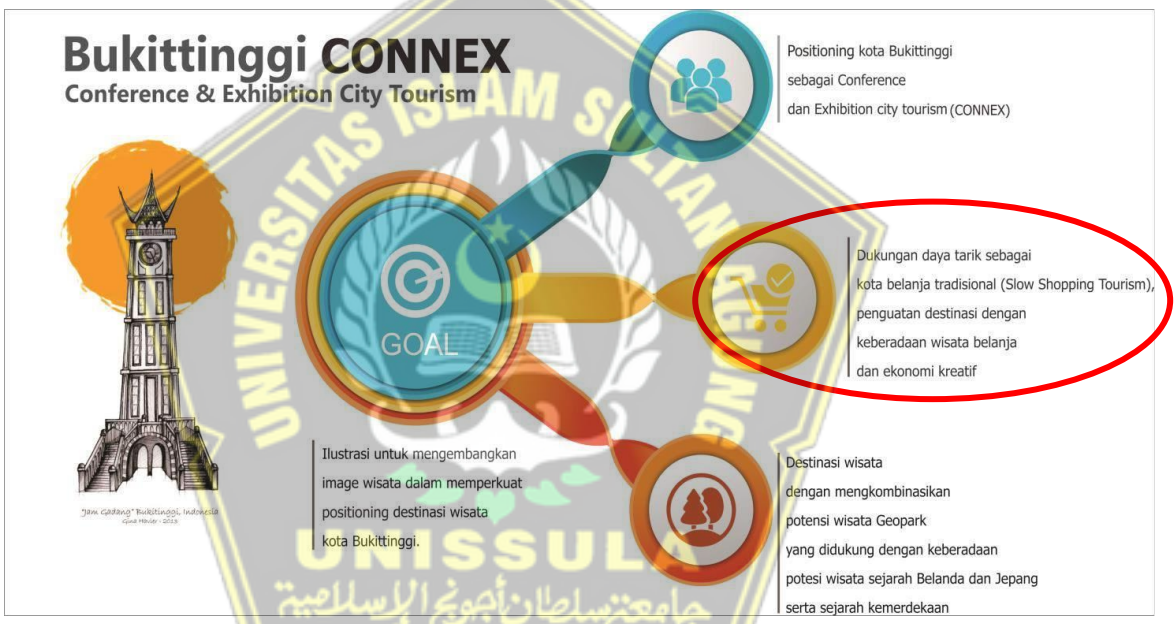

Gambar 3. 8 Visi Bidang Kepariwisataan Kota Bukittinggi
Sumber : RIPPARKO Bukittinggi tahun 2019 -2025

Berikut adalah konsep pengembangan wisata belanja Pasar Atas dalam Rencana Induk Pengembangan P RIPPARKO 2019 – 2025.

Tabel III. 2 Bukittinggi Tourissm Development Concept

Konsep Pengembangan	Tourism Servicescape (Desain Pengembangan)	Tourist Experience & Aktivitas Wisata	Pengembangan Infrastruktur	Jenis Pariwisata	Taregt Pasar Psikografis	Target Pasar Geografis	Pengelola Destinasi
Slow Shopping Experience	Pasar yang didsesain dengan suasana tradisional	• Pusat informasi dalam membagikan saran gaya, finansial dan edukasi marketing • pusat belanja yang tertata rapi sesuai jenis barang yang dijual • jual beli • Jasa Penitipan	• Pusat Informasi • Echo Toilet • Kafe • Toko Souvenir • Musholla • Restoran/kantin/kafe • ATM • Rest Area	Mass Tourism	• Pecinta belanja • Retailer	Wisatawan mancanegara • Singapura • Belanda • Jerman • Korea • Cina Wisnus • Jambi • Pekanbaru • Sumbar • Medan • Jakarta	DMO (Destination Management Organization) yang dikontrol oleh pemerintah

Sumber : RIPPARKO Bukittinggi, 2019 - 2025

Dalam konsep pengembangan terjadi indikasi ketidakberhasilan implementasi diantaranya banyak pedagang yang belum tertata, tidak adanya rest area, jasa penitipan, pusat informasi, sehingga wisatawan yang datang hanya wisatawan lokal. (Wicaksana & Rachman, 2018). Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi terkait proses implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WISATA BELANJA DI KAWASAN PASAR ATAS KOTA BUKITTINGGI

Evaluasi implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas ini dilakukan dengan serangkaian tahapan sehingga menghasilkan tema-tema empiris. Tema tema ini berasal dari lapangan sebagaimana adanya dari hasil pendalaman yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan wawancara dinas pelaksana yang dituju sebagai informasi utama dalam mengevaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas ini dan dikonfirmasikan kebenarannya dengan wawancara kepada wisatawan dan pelaku usaha serta melalui observasi yang dilakukan di Kawasan Pasar Atas sendiri.

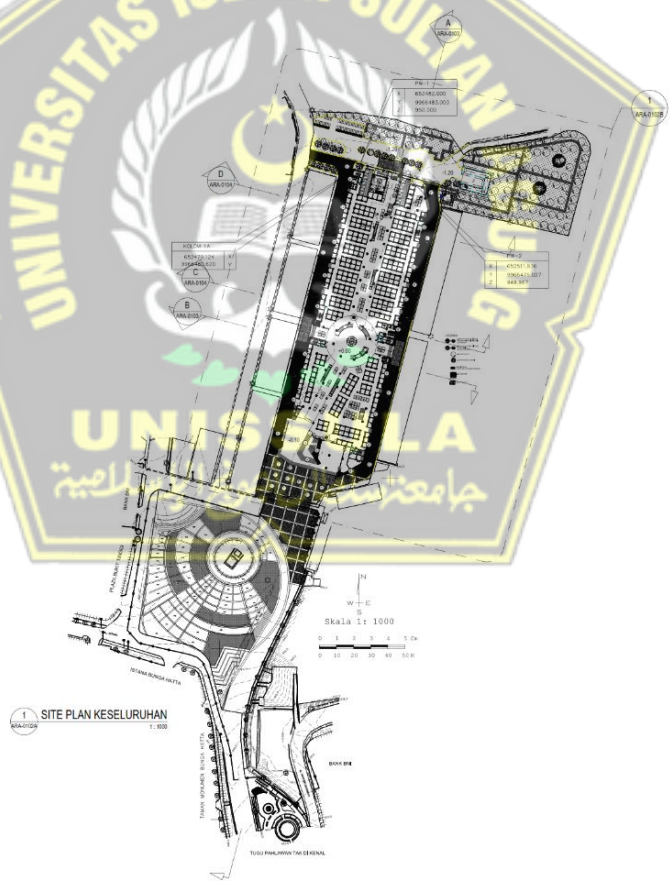

Gambar 4. 1 Site Plan Kawasan Pasar Atas
Sumber : Dokumen Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi, 2023

Penentuan parameter berdasarkan konsep evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut.

a. Mudah tidaknya masalah dikendalikan
b. Kemampuan kebijaksanaan dalam menstruktur proses implementasi
c. Variable diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi
d. Tahap tahap didalam proses implementasi

4.1 Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

Masalah yang mudah dikendalikan adalah masalah yang lebih mungkin untuk diatasi oleh kebijakan publik yang efektif dan memiliki dampak yang signifikan pada masalah tersebut. (Mazmanian dan Sabatier,1983) Adapun sub tema ini adalah kesulitan teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, presentase sekolmpok sasaran dibanding jumlah keseluruhan dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

4.1.1 Kesulitan Teknis

Tingkat kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan publik karena adanya kendala teknis. kesulitan teknis adalah masalah yang mempengaruhi suatu proses implementasi. Kesulitan teknis yang ditemukan dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas ialah keterbatasan lahan dan pembangunan, kesulitan koordinasi antar dinas pelaksana dan tidak adanya kajian teknis terkait investor dalam pengembangan Kawasan Pasar Atas.

a. Keterbatasan lahan dan pembangunan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Kawasan Pasar Atas terdapat masalah keterbatasan lahan dan pembangunan di Kawasan Pasar Atas. Keterbatasan lahan dikarenakan topografi kota bukittinggi yang berbukit dan lahan yang terbatas. Jam Gadang memiliki tinggi 27 meter. Yang berarti kawasan tersebut memiliki batasan tinggi maksimal 18 meter dan tidak boleh melebihi tinggi Jam Gadang. Larangan membangun tersebut mempertimbangkan keselamatan dan keamanan kepentingan umum. Hal tersebut juga dikatakan oleh dinas pelaksana seperti wawancara berikut,

"Yang saya tahu itu tentang tinggi bangunan di Kawasan tersebut tidak boleh melebihi tinggi jam gadang. Hanya 2/3 dari jam gadang saja yang diizinkan. Memang permasalahannya dari topografi bukittinggi tu berbukit dan lahan juga terbatas, kalau untuk pembangunan juga sulit." (OPD-II/13/4/23)

Hal serupa juga dijelaskan oleh dinas pelaksana bahwa adanya regulasi terkait tinggi bangunan yang disebabkan oleh faktor topografi dan keterbatasan lahan yang menjadi pengembangan wisata belanja sulit dilakukan.

"Regulasi khusus terkait Kawasan Pasar Atas sendiri tinggi bangunan tidak boleh melebihi 2/3 dari jam gadang." (OPD-I/11-4/23)

Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Kota Bukittinggi pasal 87 Ayat 4 bahwa "Pemerintah daerah dapat mengatur suatu kawasan sebagai kawasan Jam Gadang (Kawasan Pasar Atas dan Kawasan sekitar Benteng Pasar Atas) dengan larangan membangun dengan tinggi bangunan yang melebihi tingginya Jam Gadang dalam peraturan walikota dengan mempertimbangkan keindahan, keselamatan dan keamananan demi kepentingan umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa adanya keterbatasan pengembangan lahan menjadi salah satu kesulitan dalam pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas.

b. Kesulitan koordinasi antar dinas pelaksana

Dalam implementasi kebijakan diperlukan koordinasi antar dinas pelaksana dalam keberlangsungan kebijakan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa adanya kesulitan koordinasi antar dinas pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas dikarenakan banyaknya dinas yang terlibat menyebabkan pelaksanaan implementasi kebijakan kurang maksimal,

"kesulitan yang dirasakan dalam pengembangan wisata belanja ini ya koordinasi antar dinas pelaksananya, karena banyak dinas yang terlibat yang sehingga pelaksanannya kurang maksimal." (OPD-II/13/4/23)

Hal ini juga dituturkan oleh dinas pelaksana yang merasa kesulitan melakukan komunikasi dan koordinasi karena dipengaruhi ego sektoral dan pengkotakkan tugas baik secara internal dan eksternal pada dinas pelaksana.

> *"Sebenarnya ini lebih ke masalah koordinasi dan kerjasama antar sektor masih kurang optimal." (OPD-III/10/5/23)*

Adanya kesulitan koordinasi antar dinas pelaksana seperti yang dijelaskan dalam rencana startegis dinas pariwisata Kota Bukittinggi bahwa salah satu analisa kelemahan (Weakness) situasi dan faktor diluar yang menghambat dinas pelaksana untuk mecapai keberhasilan program, kelemahan yang mempengaruhi dinas antara lain ialah belum maksimalnya koordinasi dan komitmen dalam dan antar dinas pelaksana dalam pengembangan wisata. Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku pariwisata juga dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan belum maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar dinas pelaksana dalam pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas masih kurang optimal. Sehingga perlu meningkatkan budaya kemitraan *(Public private partnership)* dalam pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas.

c. Tidak adanya kajian teknis mendalam terkait investor

Keberadaan investor merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan wisata belanja, dengan kehadiran investor dapat membantu berkembangnya sektor pariwisara yang berdampak positif bagi daerah tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu kesulitan yang dirasakan dinas pelaksana dalam menyeleksi investor dikarenakan investor yang diinginkan adalah investor asli Kota Bukittinggi yang mengedepankan budaya lokal atau nusantara dan berupa start up bukan pengusaha yang sudah mapan seperti wawancara berikut,

> *"Dalam menggaet inpestor kami juga kesulitan karna inpestor yang diinginkan bukan inpestor luar. Jadi masih dalam tahap mencari dan menyeleksi siapa inpestor yang akan menempati pasar atas sendiri." (OPD-II/13/4/23)*

Hal serupa juga dituturkan oleh dinas pelaksana bahwa kajjian terkait investor dilakukan setelah rekonstruksi Pasar Atas. bahwa dinas pelaksana sedang mencari investor atau brand lokal bukan brand-brand luar karena dapat mematikan UMKM.

> *"Sudah ada peminat tentu kita juga harus melakukan kajian-kajian sebelum mengaprove proposal yang masuk dengan kajian teknis yang mendalam dan detail. untuk pasar atas kita rencananya memang sedang mengaet investor lokal. Artinya kita mencari penyedia jasa kuliner atau jasa apapun yang brandnya brand lokal. Karna pasar atas ini udah banyak peminat dari brand-brand luar negeri seperti starbuck, pizza hut, McD, KFC, kita gak penuhin karna bisa mematikan UMKM juga. Kalaupun itu masuk nanti francise local yang mengedepankan budaya lokal. Minimal budaya nusantara. Dan pemiliknya juga bukan pengusaha yang sudah mapan. Setidaknya berupa start up." (OPD-III/10/5/23)*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kajian teknis mendalam terkait investor sebelum dilakukan rekonstruksi menjadikan banyaknya produk luar negeri atau daerah lainnya masuk mengakibatkan rendahnya peluang pelaku usaha dalam mengembangkan produk wisata. Adanya program ini muncul setelah dilakukan rekonstruksi pada pasar atas sehingga dinas pelaksana kesulitan melakukan kajian teknis dalam memilih dan memilah investor yang akan menempati Pasar Atas.

4.1.2 Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Perbedaan karakter dari kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan publik. Ini berkaitan dengan kelompok sasaran pembuatan kebijakan, atau masyarakat setempat, yang dapat homogen atau heterogen. Suatu program atau kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan dalam masyarakat yang homogen, tetapi dalam masyarakat yang heterogen, itu akan lebih sulit atau lebih sulit dilaksanakan. (Mazmanian dan Sabatier,1983).

Dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja, keragaman perilaku kelompok sasaran yaitu pelaku usaha sangat penting. Kota Bukittinggi merupakan kota dengan masyakarat yang heterogen/beraneka ragam, termasuk

pelaku usaha di Kawasan Pasar Atas tidak hanya berasal dari Kota Bukittinggi, tetapi banyak juga yang berasal dari provinsi lain sumatera seperti Kabupaten Agam, Kota Pekanbaru, Kota Padang, dan Kabupaten Pasaman. Sehingga keragaman karakter masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan. menjadikan suatu kebijakan sulit dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh dinas pelaksana sebagai berikut,

"Adanya perbedaan pandang antar OPD" (OPD-II/13/4/23)

Hal senada juga dituturkan oleh dinas pelaksana yang merasa masih adanya ego sektor sehingga antar dinas pelaksana masih mengkotakan dan membedakan tugas. Budaya kemitraan antar dinas pelaksana kurang optimal.

"Adanya ego sektoral antar dinas pelaksana yang masih membedakan tugas" (OPD-III/10/5/23)

Keragaman perilaku dinas pelaksana secara internal atau eksternal menjadikan kebijakan sulit diimplementasikan. Hal tersebut berdampak pada kelompok sasaran yang menjadi target kebijakan. Adanya perbedaan perilaku dari dinas pelaksana kepada kelompok sasaran seperti program kebijakan yang hanya kelompok tertentu mendapat akses.

"Ada, Sebagian orang. Ante jarang diikutin. Orang-orang tertentu aja yang diikutkan. Kadang kita gatau tiba-tiba udah meeting aja. Pergi pameran juga dipilih yang mereka kenal aja. Kalau yang program pemimpin dulu dilanjutkan udah bagus cuman nggak dilanjutkan dengan yang sekarang." (PU-III/11/5/23)

Berdasarkan potongan informasi diatas, program pengembangan termasuk program pelatihan dan pameran, belum maksimal karena terdapat perbedaan pandangan dan ego sektoral antar dinas pelaksana. Hal ini menyebabkan pelaku usaha merasa bahwa hanya kelompok tertentu yang memiliki akses untuk mengikuti pelatihan dan pameran.

4.1.3 Presentase Kelompok Sasaran Dibanding Jumlah Keseluruhan

Secara umum jumlah kelompok sasaran yang diperkirakan akan menjadi target kebijakan publik dibandingkan dengan jumlah total kelompok sasaran/pelaku usaha. (Mazmanian dan Sabatier,1983).

Dalam pemgembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas, kelompok sasaran keseluruhan yang menjadi target kebijakan ada sekitar 1.751 pelaku usaha, tetapi dalam pelaksanaannya yang menjadi target hanya 1.263 pelaku usaha. berikut wawancara yang dilakukan dengan dinas pelaksana,

> *"Untuk saat sekarang, Gedung pasar atas punya kapasitas 863 petak toko. Kemampuan menampung kalau boleh kita bilang pedagang kaki lima atau los sekitar 400 petak juga di dalam Gedung pasar." (OPD-III/10/5/23)*

Berdasarkan informasi menurut dinas pelaksana bahwa kapasitas keseluruhan Pasar Atas bisa menampung 1.263 pelaku usaha. Saat ini jumlah pelaku usaha yang ada di Gedung Pasar Atas ialah 844 pelaku usaha, total PKL/Los 889 terdiri dari 279 PKL/los bulanan dan 610 PKL/Los harian. Dapat dilihat pada gambar 4.2

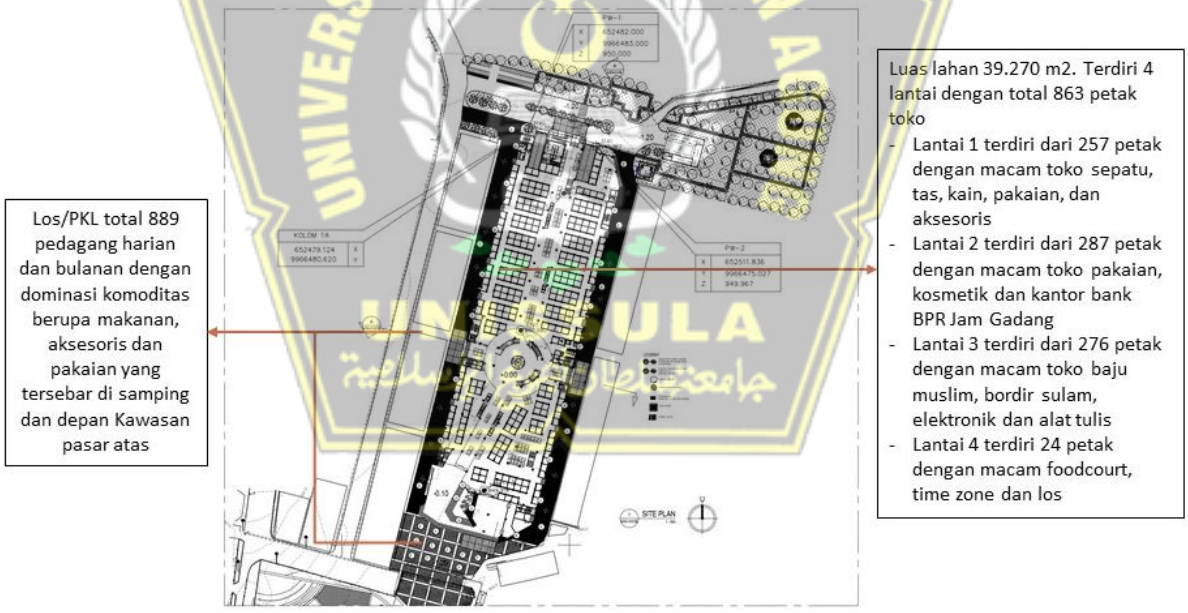

Gambar 4. 2 Sebaran Los/PKL dan Toko di Kawasan Pasar Atas
Sumber : Dokumen dinas Perdagangan Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan presentase kelompok sasaran hanya sekitar 32% dari total kelompok sasaran yang dapat ditampung dan direlokasi ke Gedung Pasar Atas dibanding seluruh jumlah pelaku

usaha di Kawasan Pasar Atas. sehingga perlunya melibatkan kelompok sasaran sehingga implementasi kebijakan terlaksana tepat sasaran.

4.1.4 Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang diinginkan

Tingkat peralihan sikap yang diharapkan bisa tercapai melalui implementasi kebijakan publik. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan Ini berkaitan dengan bagaimana perilaku kelompok sasaran yang diharapkan akan berubah dengan program yang ada saat ini. Ketika program bersifat kognitif dan memberikan pengetahuan, implementasi kebijakan atau program akan lebih mudah. Sebaliknya, program yang bertujuan untuk merubah sikap atau perilaku masyarakat cenderung lebih sulit. (Mazmanian dan Sabatier,1983).

Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan dalam implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas ialah pelaku usaha terutama PKL/Los lebih tertata dan terkoordinir, wisatawan dan pelaku usaha yang sadar akan kebersihan, program pemimpin dahulu dapat dilanjutkan serta penataan site yang menguntungkan secara ekonomi.

a. Penataan pasar yang rapi dan terkoordinir

Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan yaitu adanya program yang dilakukan dinas pelaksana seperti penertiban pasar pada PKL/Los yang ada di Kawasan Pasar Atas agar menempati Gedung Pasar Atas ialah pelaku usaha yang sama sebelum dilakukan rekonstruksi, tetapi dalam pelaksanaannya yang menempati Gedung Pasar Atas ialah orang baru yang memiliki koneksi dengan dinas pelaksana. Sehingga pelaku usaha lama yang tidak mendapati tempat kembali tetap mendirikan usaha disekitar Kawasan Pasar Atas menggunakan lahan trotoar dan jalan, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh dinas pelaksana,

> *"Penataan PKL di pasar atas lebih tertata rapi dan terkoordinir" (OPD-II/13/4/23)*

Hal lain yang ditemukan ialah adanya harapan program pemimpin dulu dilanjutkan dengan pemimpin sekarang. Seperti penataan lingkungan baik parkir, taman dan PKL/los di Kawasan Pasar Atas.

"Kalau yang program penataan pasar pemimpin dulu dilanjutkan udah bagus, cuman nggak dilanjutkan dengan yang sekarang. (PU-III/11/5/23)

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa masih belum tertatanya PKL/Los, masih banyaknya PKL/Los yang berada di jalur pedestrian yang dimana jalur itu juga digunakan sebagai lewatnya kendaraan roda dua dan jalur jalan kaki wisatawan menyebabkan macet dan acak-acakan sehingga terganggunya akses pejalan kaki dan wisatawan. Sehingga penataan Kawasan Pasar Atas belum maksimal dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3.

a. Belum tertatanya PKL/Los

b. Masih banyak PKL/Los yang bertempat di jalur pedestrian

c. Pedagang banyak yang berjualan di area terbuka (area pejalan kaki)

Gambar 4. 3 Kondisi PKL/Los di Kawasan Pasar Atas

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa dibutuhkan keterlibatan pelaku usaha dari awal perencanaan program sehingga setelah dilakukan rekonstruksi, pelaku usaha yang lama tetap dapat menempati tempatnya dulu dan tidak digantikan oleh orang baru. Akibatnya, menjamurnya pelaku usaha lama yang tidak dapat tempat di sekitar Kawasan Pasar menyebabkan akses jalur

pejalan kaki dan wisatawan terganggu. Sehingga diperlukan Kerjasama antara dinas pelaksana dan pelaku usaha dalam menata lingkungan Kawasan Pasar Atas agar lebih tertata dan terkoordinir.

b. Kebersihan Kawasan Pasar Atas

Hal lain yang ditemui dilapangan bahwa masih banyak pelaku usaha dan wisatawan yang belum sadar akan kebersihan merupakan hal yang sulit dilakukan dengan mengubah perilaku masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu wisatawan terkait dengan kebersihan sebagai berikut.

> *"Wisatawan dan pedagang belum sadar kebersihan, soalnya masih banyak orang-orang buang sampah sembarangan dikawasan tersebut" (W-I/11/5/23)*

Hal serupa dikatakan oleh wisatawan lain seperti berikut,

> "*Masih kurang sadar akan kebersihan karena masih banyak yang membuang sampah sembarangan, terganggunya kebersihan bisa menimbulkan lingkungan yang kurang nyaman dan aman" (W-IV/11/5/23).*

Gambar 4. 4 Kondisi Kebersihan Pasar Atas
Sumber : Dokumentasi pribadi, 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa masih banyak wisatawan dan pelaku usaha yang belum menerapkan kebersihan sebagai

bagian dari wisata. Sehingga diperlukan sosialisasi dan himbauan pada wisatawan dan pelaku usaha dalam program sadar wisata terkait kebersihan wisata belanja Kawasan Pasar Atas.

c. Belum beradaptasinya pelaku usaha terhadap perubahan site

Hal lain yang ditemukan yaitu belum beradaptasinya pelaku usaha dengan tempat yang baru karena adanya jarak antar pedagang setelah dilakukan rekonstruksi menyebabkan penurunan penjualan. Sehingga pelaku usaha lebih nyaman dengan tempat yang dulu. Seperti potongan wawancara yang dilakukan peneliti oleh salah satu pelaku usaha seperti berikut,

> *"Jauh banget bedanya, kalau yang dulu benar-benar pasar karna bener-bener rapat gitu antar pedagangnya. Sekarang kan ada jarak antar pedagang. Kalau sekarang kayak mall bukan pasar lagi. udah dikotak-kotakin lahannya, efeknya jadi banyak si dari segi jual beli efeknya juga ada. Nggak menguntungkan tempat-tempat kayak gini." (PU-II/11/5/23)*

Hal serupa juga dikatakan oleh pelaku usaha lain seperti berikut,

> *"Kalau nyaman ya nyaman yang dulu karna kita dekat ya antar pedagang itu. Terus karna kondisi juga ya missal dulu disebelah rame kita dapat juga pembelinya. (PU-III/11/5/23)*

a. Kondisi site lama sebelum dilakukan penataan

b. Kondisi site baru setelah dilakukan penataan ulang

Gambar 4. 5 Perbedaan site sebelum dan setelah penataan ulang

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa pelaku usaha masih belum beradaptasi dengan tempat yang baru karena adanya jarak antar pedagang yang tidak menguntungkan dari segi ekonomi. Sehingga pelaku usaha agar dapat segera beradaptasi dengan site baru.

4.1.5 Temuan Studi Parameter Mudah Atau Tidaknya Masalah Dikendalikan

a. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar dinas pelaksana.
b. Adanya keterbatasan pengembangan lahan
c. Belum adanya kajian teknis yang mendalam terkait investor menyebabkan rendahnya peluang produk UMKM.
d. Adanya perbedaan pandang dan ego antar dinas pelaksana yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan bagi pada pelaku usaha
e. Kebijakan yang tidak sesuai sasaran mengakibatkan kurangnya pengawasan dan penertiban pasar terutama Los/PKL

4.2 Kemampuan Kebijakan Dalam Menstrukturkan Proses Implementasi

Pentingnya kemampuan kebijaksanaan dalam merancang struktur proses penerapan yang efektif. Ini melibatkan mendefinisikan tugas dan kewajiban semua pihak dan menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap pihak untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan lancar. (Mazmanian dan Sabatier,1983). Dalam hal ini sub tema yang dibahas terkait kejelasan konsistensi

tujuan, penggunaan teori kausal yang memadai, alokasi sumber dana yang tepat, keserasian hierarki dalam dan diantara dinas pelaksana, keputusan dinas pelaksana serta rekruitmen pejabat pelaksana.

4.2.1 Kejelasan Konsistensi Tujuan

Kesepakatan dan keserasian antara tujuan pembangunan kota dengan tujuan pembangunan nasional. Sebuah kebijakan harus jelas dan konsisten. Disebabkan fakta bahwa suatu kebijakan memiliki isi yang jelas akan memudahkan implementasinya dan menghindari penyimpangan dalam pengimplementasiannya. (Mazmanian dan Sabatier,1983).

Kejelasan konsistensi tujuan dapat dilihat dari tujuan rencana induk pariwisata dengan pelaksanannya dilapangan seperti apa. Seperti wawancara yang peneliti lakukan dengan dinas pelaksana, dikatakan bahwa dinas pelaksana sudah konsistensi dalam melaksanakan tujuan dan program-program yang ada dalam rencana pariwisata. Seperti hasil wawancara berikut,

> *"Dari kami sendiri kesiapan dan konsistensi sumber daya manusia nya sudah baik. Juga sudah siap untuk melaksanakan program-program pariwisata yang ada di rencana pariwisata tersebut." (OPD-II/13/4/23)*

Dalam dokumen rencana induk pengembangan kepariwisataan Kota Bukittinggi, tujuan pembangunan kepariwisataan sebagai berikut,

a. Mewujudkan destinasi pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian;
b. Mewujudkan optimalisasi pasar tradisional dan ekstensifikasi pasar potensial pariwisata;
c. Mengembangkan kelembagaan yang profesional dalam mewujudkan usaha kepariwisataan yang berkelanjutan.

Hal tersebut dikatakan oleh dinas pelaksana telah melakukan persiapan dan konsistensi pada kebijakan pengembangan yang dilakukan.

Namun wujud pembangunan pariwisata Kota Bukittinggi yaitu :

a. Peran masyarakat masih belum optimal untuk memenuhi potensi sector pariwisata sebagai kontribusi Peningkatan PAD daerah. Karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam perencanaan sampai evaluasi implementasi kebijakan pengembangan Pasar Atas.

b. Kerjasama dan kemitraan pemangku kepentingan pembangunan pariwisata (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat) masih belum optimal. Hal ini juga ditegaskan dalam rencana strategis dinas pelaksana bahwa berkembangnya industri pariwisata di sekitar destinasi wisata dikarekan informasi investasi bagi investor terkait dalam mengembangkan industrialisasi pariwisata dikota Bukittinggi masih rendah. Kurangnya koordinasi yang optimal antara pemerintah pengusaha dan masyarakat dalam menyikapi potensi destinasi pariwisata.
c. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan program secara optimal dengan kompetensi pelayanan publik yang tinggi. Karena banyak kualitas SDM yang tidak sesuai bidang kerja dengan kompetensi yang rendah.

Berdasarkan hasil diatas, didapat kesimpulan bahwa adanya ketidakjelasan/inkonsistensi antara tujuan pembangunan kepariwisataan dengan wujud nyata yang ada dilapangan. Sehingga perlunya evaluasi implementasi tujuan dalam pelaksanannya.

4.2.2 Digunakannya Teori Kausal/Penyebab Yang Cukup

Penggunaan teori yang dapat menjelaskan hubungan variabel terhadap dampak kebijakan publik. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Dalam hal ini digunakannya teori penataan ruang terkait perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi dalam penataan ruang. Dalam temuan lapangan adanya alih fungsi lahan trotar yang menjadi tempat parkir dan jalur pedestrian yang digunakan untuk berjualan oleh PKL/Los sehingga menyebabkan ketidaknyamanan wisatawan dan pelaku usaha. Hal ini juga dirasakan oleh pelaku usaha yang merasa parkir belum tertata dan masih maraknya parkir liar seperti wawancara berikut,

> *"Lingkungannya belum tertata menurut ante, walaupun dibawah ada basemen parkir tapi masih ada yang parkir di depan toko-toko pedagang. Parkirnya juga masih dikuasai preman-preman" (pu-1/11/5/23)*

Hal senada juga dikatakan oleh pelaku usaha lain seperti berikut,

"Kalau itu udah cukup tapi mungkin mereka bingung turunnya dimana ya. Parkirnya juga masih kurang karna keterbatasan lahan. Jadi parkir2 motor mobil sekitar masih ada yang belum tertata." (PU-III/11/5/23)

Maka dilakukan analisis perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi pada permasalahan ini. Hasilnya sebagai berikut,

Perencanaan : adanya fasilitas parkir basement yang disediakan

Pemanfaatan : sudah dimanfaatkan tetapi kapasitas masih belum mencukupi kebutuhan pengunjung dan masih ada parkir liar yang dikuasai preman

Pengendalian : disediakan Gedung parkir oleh dinas perhubungan sebagai tambahan untuk pengunjung tetapi masih belum mencukupi

Monitoring & Evaluasi : melakukan evaluasi terkait penataan ruang dan lingkungan, Adanya keterbatasan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana pasar, sehingga peningkatan bangunan pasar yang antisipatif masih belum optimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa diperlukan monitoring dan evaluasi terkait penataan ruang dalam pengembangan sarana prasarana pasar secara optimal.

4.2.3 Ketepatan Alokasi Sumber Dana

Tingkat akurasi dalam mengalokasikan sumber daya ke anggaran kebijakan publik. (Mazmanian dan Sabatier,1983).

Ketepatan alokasi sumber dana diperlukan dalam proses implementasi agar adanya kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan dilapangan berjalan dan tepat sasaran. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa dinas pelaksana alokasi sumber dana yang dipunyai oleh dinas pelaksana berasal dari APBD. Seperti wawancara berikut,

"Karna wisata menjadi andalan daerah ini ya tentu punya anggaran yang cukup dan tepat sasaran. Sumber dana kami untuk menjalankan program-program berasal dari APBD." (OPD-II/13/4/23)

Berikut tabel program yang dilakukan dinas pelaksana

Tabel IV. 1 Program dinas pariwisata Kota Bukittinggi 2022

Urusan	Sasaran Kegiatan	Keluaran	Anggaran (Rp.)	Sumber APBD
Koordinasi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Wirausaha yang mengikuti pelatihan	40 Orang	250.000.000	Transfer Umum dan Alokasi Umum
Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi tingkat kab/kota dan Propinsi	4 Kali	450.000.000	Transfer Umum dan Alokasi Umum

Sumber : RKPD Kota Bukittinggi, 2022

Tabel IV. 2 Program dan kegiatan perangkat daerah dinas perdagangan Kota Bukittinggi 2022

Urusan	Aktifitas	Keluaran	Anggaran (Rp.)	Sumber APBD
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Gedung Pasar Atas	3 lokasi 12 bulan	8,5 Milyar	Transfer Umum dan Alokasi Umum
Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang Toko Grosir/Toko/Kios/Los yang dipungut retribusinya Jumlah WC Umum yang dikelola	1714 hari 4807 orang 15 unit	1,2 Milyar	Transfer Umum dan Alokasi Umum

Sumber : RKPD Kota Bukittinggi, 2022

Berdasarkan program dan kegiatan dinas pelaksana dapat dilihat tidak adanya kaitan antara permasalahan dengan program yang dijalankan. Seperti tidak semua wirausaha dapat mengikuti pelatihan, hanya 40 orang yang dapat mengikuti. Pelaksanaan koordinasi antar sektor yang dilaksanakan 4 kali tetapi pada kenyataannya masih kurang koordinasi dan komunikasi antar sektor dan adanya ego sektoral yang mengakibatkan program yang dijalankan bersama menjadi tidak maksimal dalam penerapannya. Selanjutnya pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar Atas belum maksimal terutama pada penataan parkir dan PKL/los yang masih semrawut dan menggunakan lahan pedestrian dan trotoar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa alokasi dana belum tepat sasaran karena perencanaannya berbeda dengan realisasi dilapangan. Alokasi sumber daya finansial belum optimal dan belum tepat sasaran dalam implementasi program kebijakan dinas pelaksana.

4.2.4 Keserasian Hierarki Dalam Dan Diantara Lembaga Pelaksana

Tingkat kolaborasi dan keterpaduan antara lembaga pelaksana kebijakan publik dalam mengimplementasikan programnya. Berbagai dinas pelaksana yang terkait secara vertikal dan horizontal harus bekerja sama dengan baik untuk menjalankan program dengan sukses. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

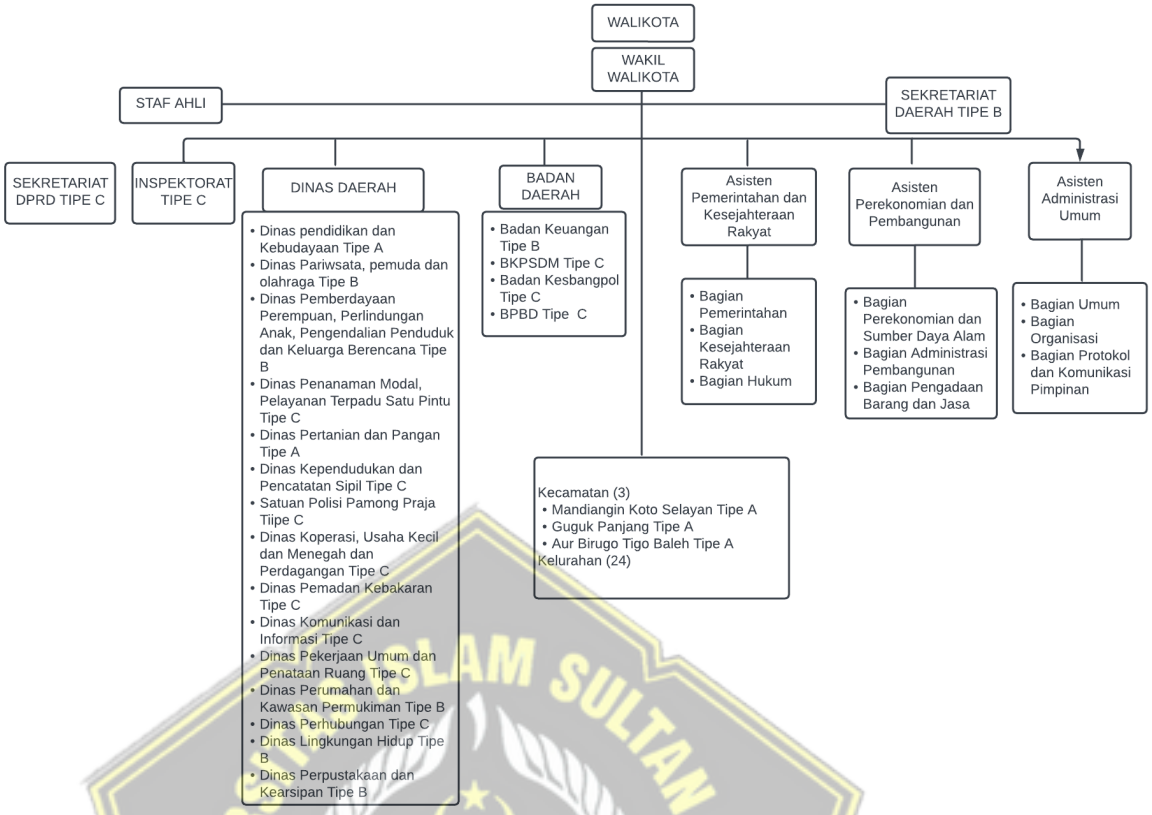

Gambar 4. 6 Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

Sumber : Perwali Kota no. 54 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja secretariat daerah Kota Bukittinggi

Berdasarkan potongan informasi diatas, terlihat adanya perbedaan tingkatan/tipe dinas pelaksana yang berbeda. Dinas pariwisata tipe B dan dinas perdagangan tipe C. Dengan adanya gap/jarak tingkatan ini mempengaruhi koordinasi dan komunikasi pada keterpaduan hierarki dalam dan diantara dinas pelakasana. Dalam rencana induk pengembangan kepariwisataan kota bukittinggi salah satu strategi pembangunan kelembagaan yaitu dengan memperkuat sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan secara internal maupun antar dinas pelaksana. Dalam hal ini bahwa belum konsistennya rencana dengan penerapannya. Hal tersebut diakui oleh dinas pelaksana dalam wawancara sebagai berikut,

> *"Adanya GAP dan kurangnya koordinasi antar dinas Pelaksana" (OPD-II/13/4/23)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa belum adanya keserasian secara vertikal dan horizontal diantara dinas pelaksana dalam implementasi program kebijakan. Sehingga diperlukan Penurunan ego sectoral sehingga terwujudnya keterpaduan hirarki dalam dan diantara dinas pelaksana.

4.2.5 Aturan Aturan Keputusan Dari Dinas Pelaksana

Konsistensi antara aturan kebijakan yang dibuat dan implementasi kebijakan publik. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Aturan keputusan dinas pelaksana berupa peraturan atau program yang dilaksanakan oleh dinas dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Dalam rencana pembangunan, dinas pelaksana menjelaskan bahwa salah satu program yang dilakukan dalam pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas yaitu memfasilitasi pedagang dengan kegiatan eksebisi dan pameran tingkat nasional, seperti informasi berikut,

> *"Memfasilitasi pedagang mengikuti eksebisi atau pameran tingkat nasional."(OPD-III/10/5/23)*

Namun, hal tersebut berbeda dengan yang dituturkan oleh salah satu pelaku usaha yaitu,

> *"Adanya perbedaan kesempatan fasilitas pada pelaku usaha dalam pelatihan dan pameran." (PU-III/11/5/23)*

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu pelaku usaha seperti berikut,

> *"Sejauh ini nggak ada sih pelatihan atau sosialisasi tu. Paling-paling pas covid iya tu karna kan prokes. Pameran ada tapi abang ga diikutkan."*

Tabel IV. 3 Rencana Pembangunan Dinas Pelaksana

Pembangunan Destinasi	Rencana Pembangunan	Penanggung Jawab
Pembangunan Daya Tarik	- Mendorong pengembangan Usaha Mikro melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi penembangan usaha mikro untuk membina pelaku usaha mikro dan mengikuti pameran.	Koperindag & UKM

Pembangunan Destinasi	Rencana Pembangunan	Penanggung Jawab
	- Mengoptimalkan fasilitas pameran dalam dan luar negeri bagi UMKM Kota Bukittinggi	Koperindag & UKM
Pemberdayaan Masyarakat	- Pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media cetak, elektronik, website serta penyelenggaraan acara wisata (lokal, nasional dan internasional)	Disparpora
	- Menyediakan dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur utama dan pendukung pengembangan wisata konsep MICE	Disparpora

Sumber : RKPD Dinas Pelaksana (Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Pariwisata Kota Bukittinggi)

Berdasarkan hasil diatas, didapat kesimpulan bahwa dalam rencana pengembangan tersebut tidak semua kelompok sasaran mendapatkan kesempatan dan akses yang sama. Sehingga aturan program dinas pelaksana tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasiannya.

4.2.6 Rekrutmen Pejabat Pelaksana

Proses rekrutmen dan seleksi pejabat pelaksana kebijakan publik untuk mendapatkan individu yang berkualitas dan relevan dengan kebijakan publik yang akan diimplementasikan. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Perlunya rekrutmen pebajat pelaksana yang relevan dengan kebijakan yang diimplementasikan berdampak pada hasil suatu kebijakan tersebut. Dalam hal ini pejabat pelaksana pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas tidak memiliki relevansi antara background pendidikan dengan kebijakan yang diimpelentasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pelaksana, bahwa

kualitas dan kuantitas kompetensi sumber daya manusia pada dinas pelaksana perlu ditingkatkan. Seperti wawancara berikut,

"Kualitas dan kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan".

(OPD-II/13/4/23)

Berikut profil pendidikan dinas pelaksana kebijakan yang mempengaruhi keputusan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Tabel IV. 4 Profil Dinas Pelaksana

Kepala Dinas Pariwisata	Drs. Hendry, M.E (Sarjana dan magister sains)
Kepala bidang pariwisata pemuda dan olahraga	Dra. Hj. Suzi Yanti, MM (Sarjana dan magister manejemen)
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan	Nauli Handayani, S.K.M, M.Si. (Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Magister Sains)
Kepala Bidang Perdagangan	Berie Surya, S.Ap (Sarjana Administrasi Publik)

Sumber : Internet, 2023

Berdasarkan hasil diatas, didapat kesimpulan bahwa adanya perbedaan relevansi background pendidikan pejabat pelaksana dengan kebijakan publik yang diimplementasikan. Hal ini disebutkan dalam dokumen rencana strategis dinas pelaksana permasalahannya yaitu kurangnya pelatihan yang kompeten untuk keahlian/ profesi tertentu dan belum optimalnya sistem manajemen pengembangan SDM. Sehingga diperlukan Perlunya penerapan Sistem rekruitment pegawai negeri yang kredibel, akuntabel, terbuka dan berbasis kompetensi.

4.2.7 Akses Formal Pihak-Pihak Luar

Tingkat akses bagi pihak eksternal atau warga masyarakat untuk terlibat dalam implementasi dan monitoring kebijakan publik. Ketika kelompok-kelompok luar yakni kelompok yang tidak terlibat dalam pembuat kebijakan seperti masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan dan tidak hanya menjadi penonton tentang adanya program atau kebijakan di wilayah mereka, sebuah program akan mendapatkan banyak dukungan. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Dalam rencana induk pengembangan pariwisata Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa Pengembangan dan pengelolaan industri pariwisata di Kota Bukittinggi relatif masih dikelola oleh pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk memanfaatkan potensi destinasi tujuan wisata. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dinas pelaksana menggaet investor ketika sudah dilakukan rekonstruksi dengan mencari penyedia jasa lokal. Seperti wawancara berikut,

> *"Akses formal pihak luar dengan Mengaet investor lokal. penyedia jasa kuliner atau jasa apapun yang brand lokal. francise local berupa start up yang mengedepankan budaya local atau budaya nusantara"(OPD-III/10/5/23)*

Berkembangnya industri pariwisata di sekitar destinasi wisata dikarekan informasi investasi bagi investor terkait dalam mengembangkan industrialisasi pariwisata dikota Bukittinggi masih rendah. Kurangnya koordinasi yang optimal antara pemerintah pengusaha dan masyarakat dalam menyikapi potensi destinasi pariwisata berdampak negatif terhadap pendapatan asli daerah dari industry pariwisata.

Hal ini juga dirasakan oleh dinas pelaksana yang melakukan kajian mendalam pada investor karena kurangnya koordinasi yang optimal pada pengusaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil diatas, didapat kesimpulan bahwa belum maksimalnya akses formal pihak luar seperti pelaku usaha dan masyarakat dalam keterlibatan program kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas. sehingga diperlukan Perlunya keterlibatan pihak luar seperti masyarakat dan pengusaha dalam mengoptimalkan potensi wisata.

4.2.6 Temuan studi kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi

Berdasarkan tema diatas, berikut merupakan temuan studi terkait kemampuan kebijakan dalam menyusun proses implementasi :

a. Belum adanya konsistensi antara tujuan kebijakan dengan implementasinya
b. Alokasi sumber daya finansial belum optimal dan tepat sasaran
c. Belum adanya keserasian secara vertikal dan horizontal diantara dinas pelaksana dalam implementasi program kebijakan

d. Perbedaan akses yang menyebabkan ketidakjelasan dan inkonsistensi rencana pembangunan dengan implementasinya di lapangan
e. Perbedaan relevansi background pendidikan pejabat pelaksana dengan kebijakan publik yang diimplementasikan
f. Kurangnya akses pihak luar seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dan pengusaha dalam mendukung program kebijakan

4.3 Proses Implementasi dipengaruhi oleh variable-variable diluar kebijaksanaan

Teori Mazmanian dan Sabatier juga mengakui bahwa terdapat variabel-variabel di luar kebijaksanaan yang dapat mempengaruhi proses implementasi. Variabel-variabel ini berupa faktor sosial, ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran, dukungan pejabat, komitmen pejabat pelaksana .

4.3.1 Kondisi Sosial Ekonomi Dan Teknologi

Faktor sosial, ekonomi dan teknologi yang berdampak pada implementasi kebijakan publik, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial budaya, modal manusia, dan infrastruktur. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Dalam temuan lapangan dilihat bahwa masyarakat dan pelaku usaha masih tradisonal atau tertutup. Seperti belum terbiasa dengan teknologi dalam mengembangkan wisata belanja. Masih perlu diperbaharui berbagai system pemasaran pariwisata yang modern dan sesuai tuntutan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pelaksana dikatakan bahwa program yang dibuat itu membantu mempermudah produk wisata berkembang dan menjadi wadah sosial dan ekonomi pelaku usaha.

> *"Program-program pariwisata membantu produk-produk wisata berkembang dan memaksimalkan pasar atas sebagai wadah mereka baik sosial maupun ekonomi." (OPD-II/13/4/23)*

Hal tersebut berbeda dengan yang dirasakan oleh pelaku usaha seperti informasi berikut,

> *"Pelaku usaha belum bisa beradptasi dengan site baru mengakibatkan penjualan turun. (PU-II/11/5/23)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa setelah dilakukan rekonstruksi dan perubahan site pada Pasar Atas tidak serta merta berdampak baik bagi pelaku usaha secara ekonomi dan sosial. Masih ada pedagang yang belum bisa beradaptasi dengan tempat/site baru yang mengakibatkan imbas ekonomi dari satu toko ke toko lain menurun.

4.3.2 Dukungan Publik

Tingkat dukungan atau ketidaksetujuan warga masyarakat terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Dalam hal ini dibutuhkan dukungan publik untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan diperlukan sentuhan dukungan dari masyarakat. Karena itu partisipasi publik sangat penting dalam proses pelaksanaan kebijakan dilapangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dinas pelaksana sudah melakukan program tepat sasaran kepada masyarakat dan pelaku usaha seperti berikut,

> *"Sasaran program untuk masyarakat dan pelaku usaha" (OPD-II/13/4/23)*

Sedangkan menurut pelaku usaha tidak dilibatkan dalam program yang dilaksanakan oleh dinas pelaksana, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut karena hanya orang tertentu diikutkan dalam program tersebut, seperti wawancara berikut,

> *"Adanya akses pada pihak tertentu dan tidak dilibatkannya pelaku usaha dalam kebijakan" (PU-III/11/5/23)*

Disisi lain adanya harapan program pemimpin dahulu dilanjutkan seperti informasi berikut,

> *"Adanya harapan program pemimpin dahulu dilanjutkan"(PU-III/11/5/23)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa tidak maksimalnya dukungan publik didapatkan karena kelompok sasaran baik pelaku usaha dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan atau program yang dilaksanakan dalam pengembangan Kawasan Pasar Atas, dan

mengharapkan program pengembangan pemimpin dahulu dapat dilanjutkan. Sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha dalam program pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas.

4.3.3 Sikap Dan Sumber Daya Kelompok Sasaran

Sikap dan persepsi kelompok dalam masyarakat yang mungkin mempengaruhi penerapan kebijakan publik. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Adanya perbedaan sikap kelompok sasaran tidak sesuai yang diinginkan antara pelaksanaan. Kelompok sasaran awal perencanaan digantikan orang baru yang punya akses/kedekatan dengan dinas pelaksana. Impactnya parkir dikuasai premanisme, trotoar dan pedestrian dipenuhi PKL. Hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh dinas pelaksana sebagai berikut,

> *"Memberikan fasilitas kepada pedagang-pedagang melakukan relokasi kaki lima dikawasan pasar atas seperti pedagang harian dan bulanan." (OPD-III/10/5/23)*

Tabel IV. 5 Perubahan sikap dan presepsi kelompok sasaran

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolak Ukur	Upaya untuk mengelola Lingkungan	
			Periode Pemantauan Lingkungan	Lembaga Manajemen dan Kontrol
5.1.1 Komponen Ekonomi-Sosial budaya				
Perubahan Sikap dan Presepsi Masyarakat				
a. Survey dan investigasi lapangan b. Pembangunan blok pasar penampungan sementara c. Pembersihan dan pengosongan pasar d. Pemindahan sementara pedagang	a. Persepsi dan sikap masyarakat pada kegiatan rencana revitalisasi dapat menimbulkan beragam tanggapan masyarakat, menimbulkan rasa kekhawatiran atau persepsi negative terhadap penurunan pendapatan sebagai akibat dari proses pembangunan berlangsung, kekhawatiran pedagang terhadap ada atau tidaknya tempat penampungan sementara atau relokasi pedagang selama rekonstruksi berlangsung karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, b. Persepsi negative masyarakat sebagai dampak turunan dari kegiatan pembangunan blok pasar penampungan sementara yang dapat menimbulkan beberapa dampak seperti peningkatan kebisingan, timbulan limbah padat, penurunan estetika lingkungan, gangguan	Adanya perubahan dan persepsi masyarakat sebagai respon dan rencana kegiatan rehabilitasi/pembangunan kembali Pasar Atas	Satu kali selama tahap pra-rekonstruksi	Dinas Pelaksana : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi Dinas Pengawas : Dinas lingkungan hidup, dinas sosial dan dinas koperasi UKM dan perdagangan Kota Bukittinggi

Sumber Dampak	Jenis Dampak	Tolak Ukur	Upaya untuk mengelola Lingkungan	
			Periode Pemantauan Lingkungan	Lembaga Manajemen dan Kontrol
	Kesehatan dan keselamatan kerja, dan gangguan lalu lintas.			

Sumber : Dokumen rekonstruksi Pasar Atas, 2018

Berdasarkan hasil diatas, didapat kesimpulan bahwa adanya perubahan dan persepsi masyarakat sebagai respon dan kegiatan rehabilitasi/pembangunan karena adanya perbedaan sikap dan perilaku karena tidak sesuainya harapan sebelum dan sesudah dilakukannya rekonstruksi.

4.3.4 Dukungan Dari Pejabat

Dukungan dan komitmen atasan untuk mendukung dan memperkuat penerapan kebijakan publik. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Dalam wawancara yang dilakukan oleh dinas pelaksana bahwa bentuk dukungan dan komitmen dengan mengembangkan atraksi, infrastruktur serta sarana prasarana.

> *"Mengembangkan atraksi wisata, pembangunan infrastruktur, meningkatkan sarana prasarana berwisata. Melakukan sosialisasi sadar wisata"(OPD-II/13/4/23)*

a. Atraksi : Pusat perbelanjaan baju, aksesoris serta souvenir
b. Pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pedestrian, jalan dan trotoar
c. Sarpras : penginapan, tempat makan, tempat souvenir, mushola
d. Sadar wisata : Melalui komunitas pengelola wisata mempromosikan sadar wisata yang jujur, bersih nyaman dan aman.

Dukungan pejabat terhadap program itu sejalur tapi pelaksanaannya tidak sejalan. Terkait pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai pemikiran kelompok sasaran/rencana induk kualitas dukungan belum maksimal, ada dinas pelaksana yang ada kepentingan pribadi sehingga tidak sejalan dengan cita-cita awal. Sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam kebijakan agar tujuan dan program yang dilakukan sejalan dengan pemikiran masyarakat menjadikan kebijakan tepat sasaran, efektif dan efisien dalam pengimplementasiannya.

4.3.5 Komitmen Dan Kepemimpinan Pejabat Pelaksana

Tingkat komitmen dan kesanggupan dari pelaksana kebijakan publik dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan efisien. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Komitmen dinas pelaksana dapat dilihat dari bagaimana suatu program kebijakan dilaksanakan dan kemampuan interaksi antar Lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan. Dalam program dinas pelaksana adanya peningkatan infrastruktur yang telah ada dan usaha menjadikan pasar sebagai magnet ekonomi yang aman, nyaman, tertib dan eco-friendly.

> *"Belum, beberapa sarana dan prasarana masih sulit dijangkau oleh para wisatawan,. (W-V/11/5/23)*

Hal senada juga dikatakan oleh wisatawan lain seperti berikut,

> *"Masih banyak parkir sembarangan dan pedagangnya juga jualan di jalan. Macet. Jadi ga nyaman." (W-III/11/5/23)*

Tetapi dalam implementasinya masih ditemukan masalah sebagai berikut,

a. Tidak adanya fasilitas sitting group

b. Adanya PKL yang memenuhi trotoar dan jalan yang menganggu aksesibilitas jalan dan parkir

Gambar 4. 7 Pelayanan Tambahan Kawasan Pasar Atas

Sumber : Hasil Survey, 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapat kesimpulan bahwa Bahwa dinas pelaksana belum efektif dan efisien dalam mengembangkan dan menata potensi-potensi yang ada di Kawasan Pasar Atas seperti tidak adanya sitting group bagi wisatawan yang ingin bersantai atau menikmati makanan dan minuman. Ada ketidaksinkronan kelompok sasaran karena penguasa lahan yang ingin mendapati uang dari lahan sempit. Program pengembangan dinas pelaksana pada implementasinya belum maksimal sehingga perlu koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat secara sinergis dan sesuai dengan tujuan program yang akan dibuat.

4.3.6 Temuan studi proses implementasi dipengaruhi oleh variable-variabel diluar kebijaksanan

Berdasarkan tema diatas, berikut merupakan temuan studi terkait proses implementasi dipengaruhi oleh variable-variabel diluar kebijaksanaan :

a. Masyarakat belum beradaptasi dengan site baru sehingga menyebabkan faktor sosial ekonomi jual beli menurun setelah dilakukan penataan ulang karena adanya jarak antar pedagang mengakibatkan imbas ekonomi antar satu toko dengan lainnya

b. Adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan karena tidak dilibatkannya masyarakat
c. Dukungan pejabat sejalur tapi pelaksanaannya tidak sejalan terkait pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai pemikiran kelompok sasaran
d. Komitmen dinas pelaksana belum efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan evaluasi koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha secara sinergis dan sesuai dengan tujuan program yang akan dibuat.

4.4 Langkah-langkah Dalam Proses Implementasi

Menurut teori Mazmanian dan Sabatier, terdapat beberapa tahap dalam proses implementasi kebijakan publik, yaitu: Tahap perencanaan, dimana merancang kebijakan publik secara rinci dan menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tahap implementasi, dimana kebijakan dilaksanakan dan tindakan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Tahap evaluasi, dimana evaluasi dilakukan untuk mengukur dampak kebijakan dan melakukan perubahan jika diperlukan.

4.4.1 Output kebijaksanaan dinas pelaksana

Variabel ini merujuk pada hasil nyata dari implementasi kebijakan publik oleh badan-badan pelaksana, seperti program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

Hasil nyata implementasi program oleh badan pelaksana yaitu :

a. Belum meningkatnya infrastruktur seperti belum adanya fasilitas sitting group dan adanya PKL yang memenuhi trotoar dan jalan yang menganggu aksesibilitas jalan dan parkir
b. Belum maksimalnya sasaran target kebijakan yang mengakibatkan belum maksimalnya pengawasan dan penertiban pasar terutama Los/PKL
c. Adanya perbedaan pandang dan ego antar dinas pelaksana yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan bagi pada pelaku usaha
d. Belum maksimalnya kesempatan sarana dan prasarana pada pelaku usaha
e. SDM yang masih rendah sehingga perlunya rekruitmen pejabat yang berkualitas

4.4.2 Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan

Variabel ini mengacu pada kemauan dan kemampuan kelompok yang menjadi target kebijakan untuk mematuhi output kebijaksanaan yang dihasilkan oleh badan-badan pelaksana. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

a. Kurangnya dukungan publik terkait program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran
b. Dukungan pejabat sejalur tapi pelaksanaannya tidak sejalan. Terkait pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai pemikiran kelompok sasaran
c. Kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dan pengusaha dalam mendukung program kebijakan
d. Komitmen dinas pelaksana belum efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan evaluasi koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha secara sinergis dan sesuai dengan tujuan program yang akan dibuat.

Sehingga kelompok sasaran tidak mematuhi output kebijaksanaan yang dilakukan oleh dinas pelaksana.

4.4.3 Dampak nyata output kebijaksanaan

Variabel ini mengukur efektivitas dari output kebijaksanaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dampak nyata output kebijaksanaan dapat dinilai berdasarkan indikator seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan akses layanan kesehatan, atau peningkatan taraf pendidikan masyarakat. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

a. Adanya inkonsistensi antara kebijakan dengan implementasi yang dilakukan.
b. Masyarakat belum beradaptasi dengan site baru sehingga menyebabkan faktor sosial ekonomi jual beli menurun setelah dilakukan penataan ulang karena adanya jarak antar pedagang mengakibatkan imbas ekonomi antar satu toko dengan lainnya.
c. Adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan karena tidak dilibatkannya masyarakat.

4.4.4 Dampak output kebijaksanaan sebagai dipersepsi

Variabel ini mengukur bagaimana kelompok dan masyarakat dalam persepsi mereka terhadap output kebijaksanaan yang dihasilkan oleh badan-badan pelaksana. (Mazmanian dan Sabatier,1983)

a. Persepsi dan sikap masyarakat menimbulkan rasa kekhawatiran atau persepsi negative lain terhadap penurunan pendapatan ada atau tidaknya tempat penampungan sementara atau relokasi pedagang karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial, peningkatan kebisingan, timbulan limbah padat, penurunan estetika lingkungan, gangguan Kesehatan dan keselamatan kerja, dan gangguan lalu lintas.
b. Adanya ketidaksesuaian penempatan pelaku usaha sebelum dan sesudah rekonstruksi Pasar Atas. Sehingga pelaku usaha yang dahulu menempati Pasar Atas dan setelah rekonstruksi tidak mendapat tempat menjadi sebuah Los/PKL di Kawasan Pasar Atas.

4.4.5 Perbaikan mendasar dalam kebijakan pengembangan pariwisata

Variabel ini mengukur dampak kebijaksanaan dengan melihat kebijakan-kebijakan yang disusun secara fundamental dalam perundang-undangan. Mazmanian dan Sabatier,1983).

Belum adanya upaya perbaikan mendasar dalam implementasi kebijakan program wisata secara singnifikan setelah dilakukannya rekonstruksi. Berikut merupakan tabel hasil evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi

Tabel IV. 6 Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Belanja Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
a) Mudak tidaknya masalah dikendalikan	1. Kesukaran-kesukaran teknis		✓	a. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar dinas pelaksana. b. Adanya keterbatasan pengembangan lahan c. Belum adanya kajian teknis yang mendalam terkait investor menyebabkan rendahnya peluang produk UMKM.	Rekomendasi berdasarkan mudah tidaknya masalah dikendalikan yaitu : a. Perlunya peningkatan budaya kemitraan antar dinas pelaksana, Pelaku usaha dan masyarakat b. Perlunya melibatkan kelompok sasaran sehingga implementasi kebijakan terlaksana tepat sasaran
	2. Keragaman perilaku kelompok sasaran		✓	Adanya perbedaan perilaku dari dinas pelaksana kepada kelompok sasaran seperti program kebijakan yang hanya kelompok tertentu mendapat akses.	
	3. Presentase kelompok sasaran dibanding jumlah keseluruhan		✓	Rendahnya presentase kelompok sasaran kebijakan dibanding jumlah keseluruhan hanya 32%.	
	4. Ruang lingkup perubahan		✓	Belum maksimalnya sasaran target kebijakan yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dan penertiban pasar terutama Los/PKL	

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
	perilaku yang diinginkan				
b) Kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi	1. Kejelasan konsistensi tujuan		✓	Belum adanya konsistensi antara tujuan kebijakan dengan implementasinya karena belum optimalnya peran masyarakat dan kerjasama antar pemangku kepentingan.	Rekomendasi berdasarkan kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi : a. Perlunya konsistensi dalam penyusunan tujuan kebijakan, b. Penggunaan teori kausal yang memadai dalam proses implementasi c. Alokasi sumber dana yang tepat sasaran d. Penurunan ego sectoral sehingga terwujudnya keterpaduan hirarki dalam dan diantara dinas pelaksana e. Perlunya penerapan Sistem rekruitment pegawai negeri yang kredibel, akuntabel,
	2. Digunakannya teori kausal yang memadai		✓	Dalam temuan lapangan adanya parkir yang masih dikuasai preman yang menyebabkan ketidanyamanan wisatawan dan pelaku usaha.	
	3. Ketepatan alokasi sumber dana		✓	Alokasi sumber daya finansial belum optimal dan tepat sasaran dalam mendukung implementasi program kebijakan dinas pelaksana.	
	4. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara dinas pelaksana		✓	Belum adanya keserasian secara vertical dan horizontal karena adanya gap diantara dinas pelaksana dalam implementasi program kebijakan	
	5. Aturan-aturan keputusan dari		✓	Dalam rencana pengembangan tersebut tidak semua kelompok	

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
	badan pelaksana			sasaran mendapatkan akses yang sama. Sehingga aturan program dinas pelaksana tidak jelas dan dan konsistensi yang menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasiannya .	terbuka dan berbasis kompetensi f. Perlunya perbaikan mendasar dalam implementasi kebijakan terutama pada pedoman, standar, prosedur dan kriteria pada dinas pelaksana g. Perlunya keterlibatan pihak luar seperti masyarakat dan pengusaha dalam mengoptimalkan potensi wisata
	6. Rekrutimen pejabat pelaksana		✓	Adanya perbedaan relevansi background pendidikan pejabat pelaksana dengan kebijakan publik yang diimplementasikan	
	7. Akses formal pihak luar		✓	Kurangnya keterlibatan pihak luar karena koordinasi yang belum optimal antara pemerintah pengusaha dan masyarakat dalam menyikapi potensi pariwisata	
c) Variable diluar kebijaksanaan	1. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi		✓	Masyarakat belum beradaptasi dengan site baru sehingga menyebabkan faktor sosial ekonomi	Rekomendasi berdasarkan Variable diluar kebijaksanaan yang

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
yang mempengaruhi proses implementasi				jual beli menurun setelah dilakukan penataan ulang karena adanya jarak antar pedagang mengakibatkan imbas ekonomi antar satu toko dengan lainnya	mempengaruhi proses implementasi : a. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam kebijakan agar tujuan dan program yang dilakukan sejalan dengan pemikiran masyarakat menjadikan kebijakan tepat sasaran, efektif dan efisien dalam pengimplementasiannya. b. Perlunya keterlibatan niniak mamak/pemangku adat sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah dalam implementasi kebijakan
	2. Dukungan publik		✓	Tidak maksimalnya dukungan publik didapatkan karena kelompok sasaran baik pelaku usaha dan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan pengembangan Pasar Atas, sehingga kelompok sasaran mengharapkan program pengembangan pemimpin dahulu dapat dilanjutkan.	
	3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok		✓	Adanya ketidaksesuaian penempatan pelaku usaha sebelum dan sesudah rekonstruksi Pasar Atas. Sehingga pelaku usaha yang dahulu menempati Pasar Atas dan setelah rekonstruksi tidak mendapat tempat menjadi sebuah Los/PKL di Kawasan Pasar Atas.	
	4. Dukungan dari pejabat atasan		✓	Dukungan pejabat sejalur tapi pelaksanaannya tidak sejalan terkait pembangunan infrastruktur yang	

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
				tidak sesuai pemikiran kelompok sasaran	
	5. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana		✓	Komitmen dinas pelaksana belum efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan evaluasi koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha secara sinergis dan sesuai dengan tujuan program yang akan dibuat	
d) Tahap-tahap proses implementasi	1. Output kebijaksanaan badan-badan pelaksana		✓	a. Belum meningkatnya infrastruktur seperti belum adanya fasilitas sitting group dan adanya PKL yang memenuhi trotoar dan jalan yang menganggu aksesibilitas jalan dan parkir. b. Belum maksimalnya sasaran target kebijakan yang mengakibatkan belum maksimalnya pengawasan dan penertiban pasar terutama Los/PKL c. Adanya perbedaan pandang dan ego antar dinas pelaksana yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan bagi pada pelaku usaha	a. Perlunya pemenuhan tahap-tahap dalam proses implementasi agar output yang dihasilkan sesuai yang diharapkan b. Perlunya dukungan publik terhadap kebijakan agar kebijakan dapat memberikan dampak dan persepsi baik

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
				d. Belum maksimalnya kesempatan sarana dan prasarana pada pelaku usaha	
	2. Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijaksanaan		✓	a. Kurangnya dukungan publik terkait program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran b. Dukungan pejabat sejalur tapi pelaksanaannya tidak sejalan. Terkait pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai pemikiran kelompok sasaran c. Kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dan pengusaha dalam mendukung program kebijakan d. Komitmen dinas pelaksana belum efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan evaluasi koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha secara sinergis dan sesuai dengan tujuan program yang akan dibuat.	
	3. Dampak nyata output kebijaksanaan		✓	a. Adanya inkonsistensi antara kebijakan dengan implementasi yang dilakukan. b. Masyarakat belum beradaptasi dengan site baru sehingga	

Parameter	Variabel	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Faktor Yang Menyebabkan	Rekomendasi
				menyebabkan faktor sosial ekonomi jual beli menurun setelah dilakukan penataan ulang karena adanya jarak antar pedagang mengakibatkan imbas ekonomi antar satu toko dengan lainnya c. Adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan karena tidak dilibatkannya masyarakat	
	4. Perbaikan mendasar dalam undang-undang		✓	d. Belum adanya upaya perbaikan mendasar dalam implementasi kebijakan program wisata secara singnifikan setelah dilakukannya rekonstruksi.	

Sumber : Hasil Analisis Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hasil evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja Kawasan Pasar Atas tidak terpenuhi/terlaksana.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kawasan Pasar Atas adalah destinasi wisata belanja dan ekonomi kreatif dengan mempresentasikan keunikan dan kearifan budaya lokal Kota Bukittinggi. Dalam hasil evaluasi implementasi kebijakan ditemukan bahwa tidak terlaksananya proses implementasi kebijakan, faktor yang menyebabkan yaitu :

a. Masih banyaknya masalah yang sulit dikendalikan karena belum optimalnya koordinasi dan komunikasi oleh dan antar dinas pelaksana, keterbatassan lahan dan pembangunan, kajian teknis yang tidak mendalam terkait investor, perbedaan pandang dan ego antar dinas pelaksana yang menyebabkan adanya ketidaksetaraan kesempatan bagi pada pelaku usaha, sasaran target kebijakan kurang maksimal yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dan penertiban pasar terutama Los/PKL.
b. Ketidakmampuan kebijaksanaan untuk menyusun proses implementasi karena inkonsisten kebijakan dengan implementasi, alokasi sumber daya finansial belum optimal dan tepat sasaran, ketidakserasian secara vertikal dan horizontal diantara dinas pelaksana dalam implementasi program kebijakan, perbedaan akses yang menyebabkan ketidakjelasan dan inkonsistensi rencana pembangunan dengan implementasinya, perbedaan relevansi background pendidikan pejabat pelaksana dengan kebijakan publik yang diimplementasikan, serta kurangnya akses keterlibatan masyarakat dan pengusaha dalam mendukung program kebijakan.
c. Masih banyak proses implementasi yang dipengaruhi oleh variable-variabel diluar kebijaksanaan karena pelaku usaha belum beradaptasi dengan site baru sehingga menyebabkan faktor sosial ekonomi jual beli menurun setelah dilakukan penataan ulang , tidak dilibatkannya masyarakat dalam kebijakan publik yang diimplementasikan, dukungan pejabat sejalur tapi pelaksanaannya tidak sejalan terkait pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai pemikiran kelompok sasaran, komitmen dinas pelaksana belum efektif dan efisien sehingga perlu dilakukan evaluasi koordinasi antara pemerintah,

masyarakat dan pelaku usaha secara sinergis dan sesuai dengan tujuan program yang akan dibuat.

d. Belum terpenuhinya tahap-tahap dalam proses implementasi karena output kebijaksanaan belum tepat sasaran dan efektif, dukungan kelompok sasaran belum optimalnya dalam mematuhi output kebijaksanaan, persepsi masyarakat yang sebagian besar masih negative terhadap pembangunan Pasar Atas baik sebelum dan setelah dilakukan, dan tidak adanya perbaikan mendasar dalam kebijakan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi implementasi kebijakan pengembangan wisata belanja di Kawasan Pasar Atas Kota Bukittinggi tidak terlaksana.

5.2 Saran dan Rekomendasi

a. Saran yang peneliti berikan pada peneliti selanjutnya agar melibatkan niniak mamak sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah dalam implementasi kebijakan

b. Rekomendasi khusus bagi pemerintah maupun semua dinas pelaksana yang berkepentingan dalam pengembangan Kawasan Pasar Atas adalah:
   1. Rekomendasi berdasarkan mudah tidaknya masalah dikendalikan yaitu :
      a. Perlunya peningkatan budaya kemitraan antar dinas pelaksana, Pelaku usaha dan masyarakat
      b. Perlunya melibatkan kelompok sasaran sehingga implementasi kebijakan terlaksana tepat sasaran
   2. Rekomendasi berdasarkan kemampuan kebijaksanaan untuk menstruktur proses implementasi :
      a. Perlunya konsistensi dalam penyusunan tujuan kebijakan,
      b. Penggunaan teori kausal yang memadai dalam proses implementasi
      c. Alokasi sumber dana yang tepat sasaran
      d. Penurunan ego sectoral sehingga terwujudnya keterpaduan hirarki dalam dan diantara dinas pelaksana

e. Perlunya penerapan Sistem rekruitment pegawai negeri yang kredibel, akuntabel, terbuka dan berbasis kompetensi
f. Perlunya perbaikan mendasar dalam implementasi kebijakan terutama pada pedoman, standar, prosedur dan kriteria pada dinas pelaksana
g. Perlunya keterlibatan pihak luar seperti masyarakat dan pengusaha dalam mengoptimalkan potensi wisata

3. Rekomendasi berdasarkan Variable diluar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi :
   a. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam kebijakan agar tujuan dan program yang dilakukan sejalan dengan pemikiran masyarakat menjadikan kebijakan tepat sasaran, efektif dan efisien dalam pengimplementasiannya.
   b. Perlunya keterlibatan niniak mamak/pemangku adat sebagai penengah antara masyarakat dan pemerintah dalam implementasi kebijakan
4. Rekomendasi berdasarkan variable tahap-tahap dalam proses implementasi
   a. Perlunya pemenuhan tahap-tahap dalam proses implementasi agar output yang dihasilkan sesuai yang diharapkan
   b. Perlunya dukungan publik terhadap kebijakan agar kebijakan dapat memberikan dampak dan persepsi baik

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN

Undang Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bukittinggi Tahun 2019 – 2025

BUKU DAN JURNAL

Akbar, F., & Mohi, K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. In *Ideas Publishing* (Vol. 1, Issue 69).

Alvionita, V., Darmastuti, A., K, R. C., & Makhya, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Publik Tentang Program Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *47*(1), 114–141. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1489

Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan;Sosialisasi;Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.

Basuki, K. (2019). Permukiman Etnis di Tepi Kali Semarang. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, *53*(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

Suardika, I. P. A. (2020). Evaluasi Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan , Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik*, *5*(2), 145–151.

Warf, B. (2014). Participatory Planning. *Encyclopedia of Geography*, 12–30. https://doi.org/10.4135/9781412939591.n864

Wicaksana, A. (2016a). No Title No Title No Title. *Https://Medium.Com/*, 17–37. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Wicaksana, A. (2016b). No Title No Title No Title. *Https://Medium.Com/*, 219–222. https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). No Title No Title No Title. *Angewandte*

Chemie International Edition, 6(11), 951–952., *3*(1), 10–27.

https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf

INTERNET

Publikasidagu,2022“Pasa Ateh Bukittinggi” https://pubhtml5.com/viul/rtsm/basic/

https://sumbar.poskota.co.id/2022/06/08/nomenklatur-baru-perubahan-tipe-opd-dua-dinas-dimekarkan

https://kaba12.co.id/pelatihan-bagi-pelaku-usaha-mikro-angkatan-i/

https://riezlioko.wordpress.com/2012/01/27/implemntasi-kebijakan-teori-sebatier-mazmanian/